



MODUL PENGUATAN
WAWASAN KEBANGSAAN
MELALUI AKTUALISASI NILAI-
NILAI AGAMA

MODUL UNTUK FASILITATOR



KATA PENGANTAR

KEPALA PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas berkatnya penyusunan buku modul Wawasan Kebangsaan Melalui Nilai Ajaran Agama dapat diselesaikan dan mencapai tujuan yang direncanakan. Naskah ini merupakan mengejawantahan atas serangkaian penelitian yang berjudul sama dengan modul, kemudian beberapa peneliti dan penulis melakukan penyusunan menjadi suatu panduan kebangsaan melalui ajaran agama. Wal hasil, hadirilah buku modul ini sebagai bagian dari upaya dan usaha membangun negeri yang hebat ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia

Seperti dimaklumi bersama, topik agama dengan negara, berkaitan dengan hubungan politik dan kebudayaan antarkeduanya kerap mengalami dinamika yang tinggi, khususnya di Indonesia. Tentunya hal tersebut adalah tantangan yang tidak sederhana, sebgai anak negeri berpikir hubungan negara dengan agama sudah final, ada sebagian yang menganggap sebuah proses yang terus menerus hidup. Patriotisme,

kewarganegaraan, keberagaman serta doktrin kedaulatan tidak selalu mudah dan bertahan di tengah perkembangan masyarakat dunia yang seringkali menembus batas administrasi. Begitu juga dengan agama, saat masyarakat dunia mengalami *post truth era*, namun di Indonesia perbincangan tentang agama tidak makin surut, melaju mengemuka dan berlalu lalang di ruang publik. Kiranya kondisi kebangsaan dan keberagaman yang semakin tajam diperbincangkan tersebut bergerak menyisir perdebatan, tidakkah agama dengan kebangsaan itu mestinya menyatu sebagai jiwa dan raga republik. Untuk itu konsepsi wawasan kebangsaan melalui nilai ajaran agama menjadi suatu usaha yang harus terus dilakukan.

Dengan selesainya penyusunan buku modul wawasan kebangsaan melalui nilai ajaran agama ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang telah memberi kepercayaan dan pengarahannya. Demikian juga kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusinya, kami ucapkan terima kasih. Terutama kepada Tim Peneliti dan Pelaksana Kegiatan di lapangan, terutama para penulis penyusun yang telah bekerja dengan gigih untuk mendapatkan konsepsi yang matang dan tepat sasaran.

Tentunya, sebagai sebuah dokumen, apa yang tersaji masih memiliki banyak kekurangan, karena berbagai alasan keterbatasan dari berbagai sisi memerlukan perbaikan. Oleh sebab itu, kami berharap ada masukan dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan ke depan. Lebih lanjut, buku ini kami harapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah RI yang didalamnya termasuk Kementerian Agama dalam hal kontribusi terhadap kerekatan antarwarga negara, spirit kebangsaan, rasa keberagaman moderat.

Demikian, sebagai akhir kara semoga bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat terutama fasilitator pelatihan nasionalisme dan kewarganegaraan. Amiin.

Jakarta, Desember 2016.
Kepala,
Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Muharam Marzuki, Ph.D.

Prakata Tim Penulis

Wawasan kebangsaan sebagai sudut pandang suatu bangsa dalam memahami keberadaan jati diri dan lingkungannya pada dasarnya merupakan penjabaran dari falsafah bangsa itu sesuai dengan keadaan wilayah suatu negara dan sejarah yang dialaminya. Wawasan ini menentukan cara suatu bangsa memanfaatkan kondisi geografis, sejarah, sosial budayanya dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasionalnya serta bagaimana bangsa itu memandang diri dan lingkungannya baik ke dalam maupun ke luar.

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), makna dan hakikat serta pengejawantahan wawasan kebangsaan tersebut penting dipahami oleh setiap warga negara Indonesia yang sejatinya berperan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wawasan kebangsaan, selain dapat didudukkan dalam konteks falsafah bangsa, tentu menjadi menarik apabila ditinjau dalam perspektif agama-agama yang juga memberikan penjelasan dan keberpihakan terhadap pentingnya sikap dan nilai-nilai pengakuan dan penghormatan terhadap identitas kebangsaan yang sesungguhnya telah diperjuangkan bersama-sama melibatkan semua pemeluk agama di Indonesia.

Oleh karena itu, untuk dapat memahami pengertian dan berbagai permasalahan yang menyangkut wawasan

kebangsaan terutama dalam konteks agama-agama, maka dalam disusunlah sebuah modul berjudul: “Penguatan Wawasan Kebangsaan Melalui Aktualisasi Nilai-Nilai Agama”. Modul ini selanjutnya akan disampaikan dalam workshop, pelatihan dan lokakarya baik di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Jakarta, Desember 2016

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Prakata Tim Penulis	iii	
Daftar Isi.....	iv	
PENDAHULUAN		
LATAR BELAKANG	1	
TUJUAN MODUL	3	
SIGNIFIKANSI DAN RELEVANSI MODUL	3	
SASARAN MODUL	4	
CARA PENGGUNAAN.....	4	
BAGIAN 1 PENGANTAR WORKSHOP.....	6	
BAGIAN 2 NASIONALISME DAN PANCASILA		15
BAGIAN 3 NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN KONSTITUSI		57
BAGIAN 4 BHINNEKA TUNGGAL IKA DAN KEWARGANEGARAAN		90
BAGIAN 5 DEMOKRASI		122
BAGIAN 6 EVALUASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT		152

Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN: 978-602-8739-77-1

**MODUL PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN
MELALUI NILAI AJARAN AGAMA**

TIM PENULIS:

**I Nyoman Yoga Segara; Raudatul Ulum; Syaiful Arif;
Achmad Ubaidillah; Zaebal Abidin Eko Putro; Hatim Gazali;
Kristan**

Reviewers:

**K.H. Mahbub Ma'afi
Effendi Tanumihardja
Pdt. Harapan Nainggolan
I Nengah Dana**

Penerbit:

**Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI
Jalan M.H. Thamrin Nomor 6, Jakarta 10340
Telp. 021 3920425, fax. 021 3920421
www.puslitbang1.balitbangdiklat.go.id**

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Modul ini merupakan upaya kecil untuk membangun dan memperkuat wawasan kebangsaan melalui aktualisasi nilai-nilai agama yang terus menemukan momentumnya dewasa ini, di tengah perlbagai problem keagamaan yang mengiringi kehidupan berbangsa dan bernegara. Modul ini secara khusus ditujukan bagi kalangan agamawan dan para penyuluh agama di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Itulah sebabnya, dengan mendasarkan diri pada judul modul tersebut, maka tema-tema yang dibahas dalam modul ini banyak mengupas perspektif agama-agama terhadap isu-isu sentral yakni wawasan kebangsaan, demokrasi, Bhinneka Tunggal Ika dan tema-tema lain yang relevan seputar wawasan kebangsaan.

Materi yang terkandung di dalam modul ini merupakan pengejawantahan dari hasil penelitian Aktualisasi Nilai Agama dalam Memperkuat NKRI. Peneltiian di lakukan di berbagai wilayah di Indonesia terhadap enam agama yang dilayani oleh negara dalam aspek sipil dan urusan keagamaan. Penelitian tersebut dapat membuktikan peran dan eksistensi nilai serta ajaran agama terhadap keutuhan nasional sejak dari perjuangan kemerdekaan sampai dengan era reformasi dengan berbagai dinamika. Hubungan dinamis antara agama dengan negara di Indonesia selalu menarik untuk dikaji, dielaborasi, diramu kembali menjadi alat untuk memersatukan bangsa, jika tidak disebut sebagai doktrin dapatlah disebut sebagai sebuah formulasi tatanan kehidupan bersama.

Hadirnya modul ini, sejatinya adalah sebab kebutuhan akan instrumen nilai ajaran agama di dalam sebuah workshop

kebangsaan. Modul ini sejatinya dapat digunakan dalam penyelenggaraan workshop berkaitan dengan tema penguatan wawasan kebangsaan melalui aktualisasi nilai-nilai agama, tentunya modul dimaksud diharapkan dapat menjadi guidance dalam proses belajar bersama menggali dan mendiskusikan norma-norma agama dan narasi besar demokrasi yang berkontribusi bagi penguatan wawasan kebangsaan dan pemenuhan hak-hak kewarganegaraan. Oleh karena itu pula, modul ini di samping memberikan gambaran umum bagaimana memfasilitasi sebuah workshop tentang penguatan wawasan dan kebangsaan melalui aktualisasi nilai-nilai agama tersebut, modul ini juga disertai bahan bacaan dan kajian tentang norma-norma agama dan narasi demokrasi juga diharapkan dapat memperkaya cara pandang terhadap isu-isu kebangsaan dikaitkan dengan nilai-nilai agama.

Metodologi workshop yang terdapat dalam modul ini dimaksudkan sebagai manual bagi model pelatihan orang dewasa (andragogi). Meski disertai bahan bacaan yang cukup mendalam, modul ini bukanlah manual untuk penataran yang bersifat monolog tanpa melibatkan dan memberi ruang bagi peserta untuk aktif dalam proses belajar dan proses diskusi. Modul ini sengaja dirancang untuk sebuah pelatihan yang partisipatif meskipun tidak sepenuhnya bisa dianggap sebagai partisipatif murni, karena beberapa sesi akan diisi oleh nara sumber.

TUJUAN MODUL

Modul ini dibuat untuk:

1. Menyediakan suatu panduan bagi fasilitator dalam hal menjalankan tugas memandu workshop wawasan kebangsaan melalui nilai ajaran agama, atau workshop sejenis.
2. Membangun kesamaan pandangan kebangsaan dalam persepektif agama-agama yang ada di Indonesia
3. Menjadi instrumen dari menguatkan nasionalisme, pemahaman terhadap pancasila, konstitusi, bentuk NKRI dan demokrasi.

SIGNIFIKANSI DAN RELEVANSI MODUL

Modul memiliki berbagai signifikansi dan kegunaan dalam proses pembelajaran di antaranya yaitu sebagai penyedia informasi dasar, karena dalam modul ditampilkan berbagai materi pokok yang dapat dikembangkan lebih dalam; sebagai bahan instruksi atau petunjuk bagi peserta didik, serta bahan instruksi atau petunjuk bagi peserta didik; serta sebagai bahan pelengkap dengan ilustrasi dan foto yang komunikatif. Di samping itu, kegunaan lainnya adalah menjadi petunjuk mengajar yang efektif bagi peserta didik serta menjadi bahan untuk berlatih bagi peserta didik dalam melakukan penilaian sendiri (self assesment).

Oleh karena itu, modul ini sangat relevan untuk dijadikan sebagai manual bagi para pengguna dan peserta untuk dapat melakukan proses belajar bersama dan penyampaian gagasan-gagasan pokok khususnya terkait dengan penguatan wawasan kebangsaan melalui aktualisasi nilai-nilai agama.

SASARAN MODUL

Sasaran umum modul adalah mereka fasilitator workshop kebangsaan, para penyuluh dan penggiat kegiatan kebangsaan. Adapun sasaran workshop adalah mereka para pemuda, remaja seluruh Indonesia. Baik itu mereka yang masih merasakan pentingnya penguatan wawasan nusantara, maupun mereka yang sedang belajar untuk menjadi bagian jiwa Indonesia secara utuh. Secara khusus sasaran modul diperuntukan pada mereka penggiat gerakan keagamaan, baik organisasi yang berstruktur nasional maupun kedaerahan, organisasi pemuda baik itu berbasis ketrampilan, olahraga maupun keterlibatan pada hobi dan sebagainya. Secara khusus modul diujicobakan kepada penyuluh agama yang diharapkan nantinya memberikan respon positif demi perbaikan, kemudian dapat digunakan oleh mereka menunjang tugas dan fungsinya.

CARA PENGGUNAAN

Buku modul ini dirancang untuk kegiatan workshop dengan peserta multiagama, pada enam pemeluk agama yang dilayani oleh negara. Modul yang terancang ini dapat dihidupkan pada workshop yang berlangsung selama minimal 18 jam, atau setara dengan tiga hari kegiatan. Disamping digunakan dalam workshop yang peserta terdiri dari multiagama, dapat juga digunakan dalam kegiatan workshop yang pesertanya satu agama.

Penjelasan Bagi Peserta

Agar peserta berhasil menguasai dan memahami materi dalam modul ini, lalu dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, maka bacalah dengan cermat dan ikuti petunjuk berikut dengan baik, antara lain:

- Bacalah doa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinanmu, agar diberikan kemudahan dalam mempelajari materi ini.
- Bacalah materi ini dengan seksama, sehingga isi materi ini dapat dipahami dengan baik.
- Tulislah sejumlah pertanyaan agar dapat mengkonsultasikannya apabila mendapat kesulitan.

Peran Fasilitator

- Membimbing dalam kegiatan belajar mengajar.
- Memberikan penjelasan materi modul dengan baik
- Memahami peserta yang mengalami kesulitan dalam memahami isi materi

Bagian-1

PENGANTAR WORKSHOP



Deskripsi

Workshop Penguatan Wawasan Kebangsaan melalui Nilai Nilai Agama adalah suatu dimensi pengembangan nilai diri pada bangsa Indonesia berdasarkan jati diri yang senantiasa dinamis. Agama hadir menjadi jalan hidup dan petunjuk yang melekat pada diri anak bangsa, Hubungan agama dengan negara khususnya nasionalisme kerap kali mengemuka, dengan demikian agama dan nasionalisme menjadi topik yang dinamis terus hidup di setiap zaman. Meskipun dunia dewasa ini semakin tidak terbatas pada ideologi dan tempat jika mengacu pada *linkage*, semua manusia dapat terhubung begitu rupa antarbenua, antartempat dan waktu di seluruh dunia, namun batasan imajiner menyangkut kecintaan pada negeri dan manusia didalamnya tak dapat lekang oleh waktu. Karena kalau dunia tanpa batasan itu hadir mengikis hubungan batin antaranak negeri dan kepada bumi yang dipijaknya, pelahan-lahan berdampak pada kekeringan kasih sayang kepada sesama manusia sedarah sebangsa, hal ini dapat memicu kegamangan pada indentitas diri yang semakin kabur serta orientasi berbangsa bernegara yang bercitacita luhur menjadi sulit diwujudkan. Latar belakang workshop ini adalah konsepsi hubungan antara negara dengan agama serta dampak ideologis bagi pemeluknya yang sekaligus anak bangsa yang ingin berbakti. Seperti yang diyakini di banyak agama, terutama yang terdaftar dilayani dalam hal administrasi

kependudukan dan layanan sipil lainnya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu, topik tentang hubungan agama dan negara telah ditekankan oleh ajaran agama masing masing, yang akan dibincangkan secara intens selama workshop.

Bagian awal dari workshop ini adalah menyamakan persepsi tentang wawasan kebangsaan dan nilai nilai agama keagamaan itu sendiri. Jika workshop menghadirkan peserta multiagama sangat penting untuk mencairkan hubungan satu sama lain, begitu juga jika workshop hanya menyasar pemeluk satu agama saja, maka tindakan untuk mencairkan suasana dan menyamakan persepsi tetap harus dilakukan. Berbagai latar belakang sosial, kehidupan keagamaan secara psikologis masing-masing peserta sangatlah bermacam, sehingga fasilitator penting untuk mengenali mereka secara personal setidaknya dapat menyebut nama atau panggilan yang ramah dan tepat, begitu juga komunikasi antarpeserta. Seluruh peserta harus diupayakan berada dalam kondisi rileks, mulai tumbuh rasa saling percaya, merasa nyaman dengan lingkungan workshop. Dengan kondisi yang demikian fasilitator dapat memastikan workshop dapat mencapai tujuan tujuan yang telah ditetapkan.



Tujuan Workshop

Workshop ini bertujuan untuk

1. Mencairkan suasana dan menghilangkan batasan dalam berkomunikasi antarpribadi
2. Mencapai suatu kesepakatan kesamaan persepsi tentang wawasan kebangsaan dan nilai nilai agama

3. Menyetakati beberapa hal yang penting menjadi aturan bersama selama workshop
4. Menyetakati metode yang akan dilakukan selama workshop



Alat & Materi Workshop

Alat-alat atau media yang digunakan pada bagian awal ini adalah kertas plano, spidol besar, lakban, metaplan warna warni, spidol kecil, selotip, jadwal workshop.

Pokok bahasan yang perlu disampaikan pada bagian ini adalah:

1. Perkenalan
2. Harapan dan kekhawatiran
3. Kontrak belajar
4. Indikator tentang wawasan kebangsaan dan nilai nilai agama



Waktu

Total waktu yang digunakan untuk bagian ini adalah 90 menit.



Kegiatan

Adalah daftar kegiatan yang akan dilakukan untuk menyampaikan topik yang bersangkutan. Kegiatan ini dapat dikaitkan dengan pendekatan/metode pembelajaran tertentu. Misalnya dalam pelatihan satu topik akan melibatkan kegiatan sebagai berikut: Kegiatan Pendahuluan, Kegiatan Inti (Kegiatan Bekerja berpasangan, Diskusi kelompok, dan Diskusi kelas), dan Kegiatan Penutup. Hal ini perlu disusun untuk memberi gambaran secara cepat kepada fasilitator tentang peta jenis kegiatan untuk setiap topik. Selanjutnya setiap kegiatan akan melibatkan langkah-langkah yang diperlukan pada bagian berikut.



Langkah-Langkah Kegiatan

Perkenalan (20 menit)

1. Fasilitator tampil di depan peserta dan mengucapkan selamat datang serta salam pembuka. Berikutnya penting untuk menanyakan hal hal penting yang perlu diketahui oleh orang lain yang melekat saat perkenalan yang berguna juga sebagai informasi selama kegiatan. Setidaknya, atau secukupnya tentang nama dan panggilan yang disukai.
2. Membagikan metaplan berwarna warni kepada masing masing peserta satu lembar beserta spidol kecil. Petunjukannya untuk peserta menuliskan nama dan diletakkan di atas meja bagain depan menghadap keluar agar mudah dilihat. Hal ini membantu mengingat menghafal nama satu sama lain. Begitu juga dengan fasilitator agar menuliskan nama dan ditempelkan di dada.
3. Meminta peserta untuk berbaris dalam tiga lajur.

4. Peserta diminta untuk mengurutkan diri melalui instruksi fasilitator untuk menggali informasi awal tentang diri masing-masing peserta, misalnya:
 - a. Mengurutkan dari depan ke belakang individu berdasarkan abjad huruf nama depan
 - b. Mengurutkan berdasarkan umur
 - c. Atau tinggi badan!
 - d. Usia pertama kali belajar kita suci
 - e. Pertama kali masuk SD
 - f. Menjadi penyuluh
5. Menanyakan kepada peserta, apakah mereka sudah mengurutkan secara benar
6. Mengajak seluruh peserta untuk memberikan tepuktangan bagi kelompok yang mengurutkan secara benar berdasarkan instruksi
7. Fasilitator dapat mengembangkan instruksi lain yang dapat memberikan kesenangan sekaligus informasi antarpeserta sehingga saling mengetahui dan paham satu sama lain.

Kontrak Belajar (10 menit)

1. Tempelkan tiga kertas plano di depan, usahakan dapat dilihat oleh seluruh peserta. Pokoknya tempat yang memungkinkan, tembok, papan atau apapun. Kemudian mintalah peserta pada tiga plano tersebut yaitu: Plano-1 menulis harapan, Plano-2 tulislah penghambat, sedangkan Plano-3 untuk menuliskan faktor pendukung
2. Berikan setiap peserta metaplan
3. Pada tahapan ini jelaskan kepada peserta, sebelum memasuki materi inti yang membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai nilai agama. Perlu disusun kesepakatan agar forum berjalan secara berdayaguna dan berhasil guna.

Dalam rangka memperoleh kesepakatan tersebut, mintalah mereka untuk memberikan jawaban pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apa yang peserta harapkan dari workshop ini? Untuk itu peserta diminta menuliskan satu jawaban yang tidak lebih dari lima kata. Jawaban itu harus realistis melihata temadan waktu yang tersedia; kemudian mintalah peserta untuk menempelkan metaplan dari jawaban mereka ke kertas plano yang sudah terpasang. Ajaklah mereka untuk mengelompokkan jawaban itu dengan kategori tujuan, tema, dan metode. Peserta melihat tema, periksa apakah materi tersebut dapat memberikan jawaban atas harapan mereka; berikutnya dilanjutkan dengan klarifikasi tentang prinsip-prinsip dan metode partisipatif.
- b. Berikan dua pertanyaan sebagai berikut: “apa yang mungkin menghambat proses workshop?” dan “apa yang bisa mendukung proses?”.
- c. Peserta yang telah menuliskan jawaban diminta menempelkan metaplan jawaban di atas kertas plano yang sesuai. Mintalah peserta membacakan kesepakatan terkait hal teknis, misalnya sikap, kedisiplinan, pengaturan kelas, tugas tugas peserta dan fasilitator serta beberapa hal penting lainnya.
- d. Bagikan jadwal yang sudah disiapkan panitia, pastikan semua peserta memegangnya.
- e. Jelaskan alur jadwal yang ada dan minta peserta untuk menyepakati waktu yang telah diusulkan.

HARAPAN DAN KEKHAWATIRAN	
Harapan	Kekhawatiran
Membahas persatuan dalam perbedaan	Tidak terbuka mengenai perbedaan agama

Membahas kecintaan pada negeri	Dianggap basi menyangkut isu nasionalisme
Membahas konsepsi kadaulatan negara	Kurang semangat dalam hal memertahankan bentuk negara
Membahas tuntas mengenai demokrasi	Perasaan skeptis terhadap keadaan politik saat ini

- ❖ Berbagi pengalaman tentang wawasan nusantara dan nilai nilai agama
 1. Fasilitator membagi tiga lembar kartu metaplan kepada setiap peserta
 2. Minta peserta menuliskan satu pengalaman yang paling mengharukan dalam kehidupan berbangsa Indonesia, baik dalam hal momen pribadi, peristiwa yang disaksikan misalnya keberhasilan atlet, kontingen budaya maupun kisah kepahlawanan (masing masing peserta hanya memberi satu pengalaman saja).
 3. Minta peserta menempelkan kartu metaplan pada kertas plano yang terpampang di depan dengan judul “pengalaman anak negeri”
 4. Minta beberapa peserta untuk membagi pengalamannya.
 5. Catat beberapa aspek penting tentang nilai kebangsaan yang muncul dari pengalaman peserta pada kertas plano yang berjudul “indikator wawasan kebangsaan”
 6. Beri apresiasi pada peserta yang telah membagi pengalamannya
 7. Mintalah peserta untuk menggambar apa saja yang menunjukkan ilustrasi kebangsaan dalam metaplan, kemudian tempelkan pada kertas plano yang diberi judul “kebangsaan yang diimpikan”

8. Minta peserta yang belum berbagi pengalaman untuk menjelaskan maksud gambar tersebut.
9. Catatlah aspek penting nilai kebangsaan yang baru muncul pada kertas plano yang diberi judul “indikator kebangsaan”
10. Minta satu dari sekian peserta untuk membaca indikator kebangsaan yang tertulis pada kertas plano.

Indikator Wawasan Kebangsaan

1. Cinta tanah air, ibu pertiwi
2. Bersatu, bersama, meski berbeda

11. Plano tetap ditempelkan sepanjang workshop agar mudah diingat dan terbaca



Referensi

Berisi daftar referensi yang digunakan sebagai dasar menulis topik ini. Perlu diingat bahwa identitas buku atau referensi yang isinya sempat dikutip di dalam modul ini harus terekam di dalam bagian ini.

1. Falsafah Kebudayaan Pancasila, Syaiful Arif penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2016
2. Asshiddiqie, Jimly. Tuhan’ Dan Agama Dalam Konstitusi Pergesekan Antara Ide-Ide ‘Godly Constitution Versus Godless Constitution. Dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/130/Tuhan_Dalam_Konstitusi.pdf
3. Brown, Iem . *The Revival Of Buddhism In Modern Indonesia*, dalam Ramstedt, Martin (Ed). *Hinduism In Modern Indonesia; A Minority Religion Between Local, national, and global interests*. London: Routledge. 2004.

4. Dhammananda, Sri . Buddhisme Dan Politik
<http://samaggi-phala.or.id/naskah-dhamma/bhikkhu-dan-kegiatan-politik/>
5. Ekowati, Wilis Rengganiasih Endah. *Bhikkhu Ashin Jinarakkhita's Interpreting and Translating Buddhism in Indonesian Cultural and Political Contexts*.
<http://www.undv.org/vesak2012/en/seminar2c.php>.
6. Endro, Herman S. Menapak Pasti. Kisah Spiritual Anak Madura. Jakarta: Centre of Asian Studies (CENAS), 2012.
7. Handika, Sacca. Menuju Kepemimpinan Yang Demokratis Menurut Ajaran Buddha.
<http://bimasbuddha.kemenag.go.id/filemanager/files/berita/2015/artikel%20Mahaniti%20sacca.pdf>
8. Karsan dan Tanumihardja, Effendhie . Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014.
9. Kandahjaya, Hudaya. Adi Buddha Dalam Agama Buddha Indonesia. Jakarta : Forum Pengkajian Agama Buddha Indonesia. 1989.
10. Maryono, Ari. Warga negara yang baik dalam Buddhisme.
<http://artikelbuddhist.com/2012/07/warga-negara-yang-baik-dalam-buddhisme.html>.
11. Priastana, Jo. Be Budhist Be Happy. Bahagia Bersama Triratna Buddha-Dharma-Sangha. Jakarta: Yasodhara Puteri.
12. Swearer, Donald K. The Buddhist World of Southeast Asia. Albany: SUNY Press, 2010.

Internet :

1. <http://berita.bhagavant.com/2012/06/02/buah-pikir-dan-inspirasi-buddhis-dalam-garuda-pancasila.html>

Bahan Pembelajaran

1. Lembar kerja

Lembar kerja adalah lembaran yang berisi tentang panduan satu atau beberapa jenis kegiatan yang harus dilakukan sebagai bagian dari proses kegiatan pelatihan setiap topik. Lembar kerja dibagikan kepada peserta menjelang aktivitas dilakukan. Dihindari menyusun lembar kerja yang hanya berisi daftar pertanyaan atau daftar perintah. Bagaimana menyusun Lembar Kerja yang efektif dapat dilihat pada materi penyajian (ppt) berjudul LEMBAR KERJA yang ada di Basecamp SDO. Dalam setiap topik tidak selalu memerlukan Lembar Kerja dan sebaliknya bisa memerlukan lebih dari satu Lembar Kerja

2. Catatan Fasilitator

Fasilitator dapat mengelaborasi pengalaman hidup bersama yang membahagiakan sebagai anak negeri dalam hal momen momen yang mereka dapatkan, untuk menyadarkan peserta bahwa “negara Indonesia” itu adalah anugerah, hadiah dari Tuhan yang perlu dirawat dan dijaga

3. Instrumen pre-test dan post-test

Adalah instrument untuk melakukan pre-test dan post-test. Substansi yang diukur dalam tes ini harus relevan dengan substansi topik-topik yang disampaikan untuk Paket Program. Kunci jawaban kedua jenis tes ini wajib diikut sertakan. Mengingat waktu pelaksanaan pre-test dan post-test hanya pada awal dan akhir pelaksanaan Paket Program (bukan tiap Topik), maka pre-test dan post-test untuk setiap topic digabung jadi satu.

Bagian -2

NASIONALISME DAN PANCASILA



Deskripsi

Materi hendak membedah tentang nasionalisme dan pancasila dalam hal hubungannya dengan nilai-nilai ajaran agama. Jika peserta workshop dikhususkan pada satu agama, maka nilai agama tersebut yang dibedah. Namun peserta multiagama, terutama enam agama yang dilayani negara dalam hal urusan sipil dan keagamaan, maka peserta dapat membincang dan membedah aspek ajaran dan nilai pada agamanya masing-masing yang berhubungan dengan pancasila dan nasionalisme baik sebagai pendorong kecintaan pada negeri maupun kewajiban untuk memeliharanya. Apakah pancasila dapat diterima dan sesuai dengan agama yang dianutnya, serta mungkinkah pancasila dan nasionalisme sejawa dengan ajaran agama yang dianut masing-masing. Mungkinkah pancasila sebagai alat pemersatu dan menjadi manivestasi nilai keagamaan yang dianut peserta dalam membangun kehidupan bersama di dalam wadah kebangsaan dan bernegara.



Tujuan

Menjelaskan tujuan dari topik yang akan dilatihkan. Tujuan ini harus merupakan bagian atau jabaran dari tujuan Paket Program. Tidak dibenarkan manakala tujuan Topik

bertentangan atau tidak ada kaitannya dengan Tujuan Paket Program.

Tujuan dari topik nasionalisme dan pancasila ini adalah:

1. Membangun sebuah kesadaran tentang pentingnya memahami nasionalisme dari dalam jiwa agama
2. Menyepakati tentang relasi pancasila dengan nilai agama yang dianut masing-masing peserta
3. Menelusuri sejarah kemerdekaan republik Indonesia sebagai suatu hasil usaha dan perjuangan para cerdas pandai agamawan



Alat & Pokok Bahasan

Media pembelajaran pada materi ini adalah infocus, laptop, kertas plano, spidol besar, metaplan, spidol kecil dan filem Merah Putih (atau Sang Kyai, jika peserta hanya agama Islam)

Pokok Bahasan:

1. Pancasila sebagai pemersatu dan pandangan hidup antar umat beragama
2. Jiwa Agama Dalam Pancasila
3. Hak Dan Kewajiban Umat Beragama Di Indonesia
4. Konsep Pancasila Menurut Agama
5. Konsep Agama Tentang Keumatan dan Kewilayahan
6. Peran agama dalam kemerdekaan dan memertahankan nkri dan kedaulatan wilayah
7. Justifikasi Teologis tentang Nasionalisme
8. dukungan teks suci (kitab suci, sabda nabi dan hukum)



Waktu

Total waktu yang digunakan pada bagian ini adalah 240 menit.



Metode

Proses belajar mengajar diawali dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan (*learning starts with questions*). Ceramah interaktif (*interactive lecturing*).



Langkah

Bagian ini menjelaskan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk setiap kegiatan yang ditetapkan di atas. Langkah kegiatan ini perlu disusun dengan menggunakan table dengan yang terdiri dari beberapa kolom minimal berisi: No urut langkah, Judul Kegiatan, Uraian langkah, dan waktu.

- ❖ Pancasila sebagai pemersatu dan pandangan hidup antar umat beragama (120 menit)
 1. Fasilitator membuka sesi lalu menonton film Merah Putih, atau filem Sang Kyai atau filem lain yang bertemakan kepahlawan dan jiwa keagamaan hidup di dalamnya
 2. Setelah selesai mintalah peserta untuk merefleksikan isi filem tersebut

3. Tanyakan kepada peserta, sebenarnya apa makna perjuangan kemerdekaan, memiliki bendera sendiri, lagu kebangsaan sendiri, konstitusi dan sistem hukum sendiri, memiliki identitas nasional
4. Tuliskan kata kedaulatan, dan pastikan hal tersebut menyangkut berbagai aspek kehidupan termasuk dalam hal keagamaan
5. Kemudian minta kepada peserta untuk menjelaskan perbedaan antara berdaulat (merdeka) dengan terjajah, bersatu dengan tercerai berai, beridentitas nasional dengan primordial.
6. Minta peserta untuk mengungkapkan pengalaman di kehidupan sehari-hari dalam perbedaan namun merasakan juga atas persatuan dalam bingkai kebangsaan Indonesia.
7. Tulis kunci jawaban dalam kertas plano yang diberi judul “perbedaan dan pemersatu”
8. Ajaklah peserta untuk mengalisis tentang perbedaan dan pemersatu

❖ Jiwa Agama Dalam Pancasila (50)

1. Ingatkan lagi peserta tentang perbedaan dan pemersatu
2. Berikan waktu bagi narasumber untuk menjelaskan tentang jiwa agama dalam pancasila
3. Batas waktu untuk presentasi 20 menit, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab
4. Kesempatan kepada peserta setidaknya tiga orang untuk menanggapi dan mengajukan pertanyaan
5. Narasumber merespon tanggapan peserta dan menjawab pertanyaan
6. Setelah selesai, simpulkan diskusi sesi pertama ini dan beri tekanan bahwa agama adalah inti dari pancasila,

jiwa dari kehidupan berpancasila, pandangan hidup bangsa. Untuk itu diperlukan suatu kerjasama untuk menjaga pancasila sebagai aset kebangsaan bersama, milik semua pemeluk agama.

- ❖ Hak Dan Kewajiban Umat Beragama Di Indonesia (30)
 1. Ingatkan lagi peserta hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara
 2. Berikan waktu bagi narasumber untuk menjelaskan tentang jiwa agama dalam pancasila
 3. Batas waktu untuk presentasi 20 menit, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab
 4. Kesempatan kepada peserta setidaknya tiga orang untuk menanggapi dan mengajukan pertanyaan
 5. Narasumber merespon tanggapan peserta dan menjawab pertanyaan
 6. Setelah selesai, simpulkan diskusi sesi pertama ini dan beri tekanan bahwa agama adalah inti dari pancasila, jiwa dari kehidupan berpancasila, pandangan hidup bangsa. Untuk itu diperlukan suatu kerjasama untuk menjaga pancasila sebagai aset kebangsaan bersama, milik semua pemeluk agama.
- ❖ Konsep Agama Tentang Keumatan dan Kewilayahan (30)



Referensi

Berisi daftar referensi yang digunakan sebagai dasar menulis topik ini. Perlu diingat bahwa identitas buku atau referensi yang isinya sempat dikutip di dalam modul ini harus terekam di dalam bagian ini.

1. Falsafah Kebudayaan Pancasila
2. Asshiddiqie, Jimly. Tuhan' Dan Agama Dalam Konstitusi Pergesekan Antara Ide-Ide 'Godly Constitution Versus Godless Constitution. Dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/130/Tuhan_Dalam_Konstitusi.pdf Kandahjaya, Hudaya. Adi Buddha Dalam Agama Buddha Indonesia. Jakarta : Forum Pengkajian Agama Buddha Indonesia. 1989.
3. Swearer, Donald K. The Buddhist World of Southeast Asia. Albany: SUNY Press, 2010.



Bahan Pembelajaran

1. Handout peserta

Merupakan bahan cetak yang akan diserahkan kepada peserta pelatihan yang berisi tentang substansi yang disampaikan oleh semua topik. Setiap Paket Program hanya ada satu handout yang isinya terkait dengan semua topik (Bukan setiap topik disediakan 1 handout yang terpisah). Mengingat handout ini akan didistribusikan kepada setiap peserta, maka semua referensi yang digunakan sebagai bahan penulisan handout dicantumkan di dalam bagian Referensi pada akhir handout, yang mungkin berbeda dengan Referensi Modul.

❖ Islam

Secara terminologi, istilah nasionalisme memang belum dikenal pada saat turunnya al-Qur'an bukan saja karena istilah itu tidak berbahasa Arab tetapi juga karena nasionalisme sebagai paham baru mengemuka pada akhir abad 18. Yang pertama memperkenalkan paham ini kepada umat Islam adalah Napoleon pada saat ekspedisinya ke Mesir (Shihab, 1996).

Secara etimologis, nasionalisme berasal dari bahasa Inggris Nationalism, nation (berarti bangsa) yang diambil dari bahasa Latin "Natio" yang bermakna "saya lahir", sementara isme bermakna paham. Secara sederhana, nasionalisme dapat dimaknai sebagai semangat kebangsaan, cinta kepada tanah air. Dalam pengertian secara umum, nasionalisme dapat dimaknai sebagai paham untuk mencintai bangsa atau paham kebangsaan dan negara (tanah air).

Lalu, kata apa yang sepadan dengan paham kebangsaan itu menurut al-Qur'an. Quraish Shihab, menyebutkan tiga kata: Sya'b, qaum, dan ummah. Kata qaum atau qaumiyah dapat dimaknai bangsa dan kebangsaan, seperti al-qaumiyah al-arabiyah (kebangsaan Arab). Kata ini dalam al-Qur'an diulang 322 kali. Para nabi menyeru masyarakatnya dengan Ya Qaumi (wahai bangsaku). Kata Sya'b oleh Kementerian Agama dimaknai bangsa ketika menerjemahkan surat al-Hujarat (49): ayat 3. Sementara kata ummah yang diulang dalam al-Qur'an sebanyak 9 kali juga bermakna bangsa, seperti Persatuan Bangsa-Bangsa yang diterjemahkan ke dalam al-Umam al-Muttahidah. Al-Ragib al-Isfahani dalam kamus Al-Quran Al-Mufradat fi Ghanb Al-Quran, mendefinisikan ummat sebagai kelompok yang dihimpun oleh sesuatu, baik persamaan agama, waktu, atau tempat, baik pengelompokan itu secara terpaksa maupun atas kehendak sendiri. Ibn Khaldun (Fattah, 2004), terma ummah ini sebagai dengan kata wathan yang bermakna hubungan tertentu kelompok masyarakat yang mendiami wilayah teritorial tertentu. Betapapun, tidak ada kata-kata dalam qur'an yang sama sama persis dengan arti bangsa sebagaimana yang dimaksud pada istilah masa kini.

Kendatipun demikian, bukan berarti Islam (al-Qur'an dan hadist) menolak pokok-pokok pikiran nasionalisme. Al-

Qur'an pun merekam bagaimana Nabi Ibrahim karena kecintaannya kepada negerinya berdoa sebagaimana yang termaktub dalam surat al-Baqarah 126 dan Surat Ibrahim 35 sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ١٢٦

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Nabi Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa. dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian,"

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ٣٥

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala.

Nabi Muhammad juga pernah melantunkan sebuah doa yang menunjukkan kecintaannya kepada tanah airnya.

اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد

Artinya: Ya Allah, cintakanlah kota madinah kepadaku sebagaimana Engkau mencintakan kota Mekkah kepadaku, bahkan lebihkanlah (HR. Ahmad, Baihaqi)

Mari kita lihat beberapa pokok pikiran Islam yang mendasari nasionalisme. Pertama, seluruh elemen bangsa harus menjaga

persatuan, sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam surat Ali Imran ayat 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُّواْ ۚ وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ
فُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٣

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuh musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” (QS. Ali Imran 103).

Selain itu, al-Qur’an menyebut kata ummah yang digandeng dengan wahidah sebagai kata sifat sebanyak 9 kali. Hal ini menurut Mahmud Hamdi Zaquzuq—sebagaimana yang dikutip oleh Quraish Shihab—bahwa al-Qur’an persatuan dari umat itu, bukan penyatuan atau menjadikan tunggal / satu warna dengan cara meleburkan segala perbedaan.

Sebagai konsekuensi, bangsa Indonesia berada dalam satu ummah dimana menurut Ali Syariati (1995) bahwa ummah itu mengandaikan adanya pemimpin, maka seluruh ummah Indonesia diperintahkan untuk taat kepada pemimpin sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ
اللَّهَ نَعِيمًا عَظِيمًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.....”(Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 58)

Kehidupan ummah Madinah ketika dipimpin oleh Nabi Muhammad juga menunjukkan bagaimana setiap komunitas di Madinah tunduk kepada Nabi Muhammad. Ketundukan orang-orang selain beragama Islam di Madinah bukan dalam pengertian ketundukan terhadap agama yang dibawah oleh nabi Muhammad melainkan ketundukan kepada Nabi Muhammad sebagai pemimpin tertinggi negara Madinah. Kehidupan damai dan aman juga dapat diwujudkan melalui kesepakatan atau peraturan bersama antar beragam komunitas yang harus ditaati bersama sebagaimana yang dapat dilihat dalam Piagam Madinah. Dalam pasal 25 Piagam Madinah, misalnya berbunyi:

Sesungguhnya Yahudi Bani Awf satu umat bersama orang-orang Mukmin, bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi orang muslim agama mereka, termasuk sekutu-sekutu dan diri mereka, kecuali orang-orang yang berlaku dzalim dan berbuat dosa atau berkhianat. Karena sesungguhnya yang demikian hanya akan melecehkan diri dan keluarga.

Dalam konteks Indonesia, seluruh elemen bangsa, termasuk umat Islam, telah membuat kesepakatan bersama bernama Pancasila. Sebagai konsekuensinya, umat Islam wajib mematuhi kesepakatan itu, sebagaimana hadist nabi yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi, bahwa.

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالَ أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: Kaum muslimin terikat dengan kesepakatan-kesepakatan yang mereka buat, kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram

Nah, sekarang mari kita lihat apakah isi dari Pancasila itu melanggar aturan-aturan dalam Islam sehingga umat Islam tak wajib mematuhi. Sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, menggambarkan bahwa bangsa Indonesia harus bertuhan kepada yang Maha Esa. Keesaan Tuhan (Allah) yang menggambarkan ajaran tauhid ini selaras dengan sejumlah ayat al-Qur'an seperti dalam surat al-ikhlas, Assyuara: 11, Saba': 1, al-Hasyr: 22-24, dan al-Maidah: 73. Jika umat Islam tidak mempercayai ke-esa-an Allah, maka tentunya ia masuk kategori orang-orang syirik.

Sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan gambaran kepada kita bahwa setiap umat Islam harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan keadaban. Nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan keadaban ini sangat dominan disinggung oleh al-Qur'an. Umat Islam diminta untuk saling tolong menolong (al-Maidah: 02), memberikan makan kepada yang miskin, anak yatim dan tawanan (al-Insaan: 8-9), dilarang saling mengolok-olok (al-Hujarat: 11), menegakkan keadilan (an-Nisa: 135), dan diminta untuk meneladani adab-adab Rasulullah (al-Ahzab: 21). Juga Al-Qur'an benar-benar memberi tuntunan yang sangat baik bagaimana berinteraksi dengan kelompok lain yang harus lemah lembut, tidak keras kepala dan memberikan maaf kepada mereka yang bersalah serta mengedepankan musyawarah, sebagaimana yang terangkum dalam Ali Imran 159.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ إِنَّتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya

Sila ketiga, persatuan Indonesia. Ini sudah disinggung dibagian awal sebagai syarat suatu ummat atau bangsa. Allah memerintah untuk mendamaikan umat Islam yang bertikai (al-Hujarat: 09), dan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara, dan janganlah bercerai berai (Ali Imron: 103) Bahkan dalam hadist disebutkan bahwa tidak disebut sebagai orang mukmin jika tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya.

Sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan” menandakan bahwa negara harus dioreintasikan untuk penemuan hak-hak rakyatnya secara bijaksana melalui jalur-jalur musyawarah. Ada tiga kata kunci; 1) kerakyatan, 2) hikmat kebijaksanaan, 3) permusyawaratan/perwakilan. Kerakyatan berarti bahwa untuk dan oleh rakyatlah negara ini ada, sehingga tidak boleh ada satu aturan yang melanggar kepentingan rakyat. Ini selaras dengan tujuan adanya syariat Islam, yakni kemashlahatan manusia (Al-Syatibi, t.th). Sementara makna hikmat kebijaksanaan mengandaikan bahwa segala hal harus diputuskan secara hikmat dan

bijaksana. Dalam al-Baqarah: 151 ditandaskan bahwa tujuan diutusnya Nabi Muhammad adalah untuk membacakan ayat-ayat Allah, mengajak untuk mensucikan diri dan mengajarkan kitab suci dan kebijaksanaan. Sementara, permusyawaratan/perwakilan mengandaikan bahwa segala sesuatu harus diputuskan melalui jalur-jalur musyawarah, sehingga tidak boleh ada kesewenang-wenangan dalam Islam. Ajakan untuk bermusyawarah ini cukup jamak dijumpai dalam al-Qur'an, misalnya Asyasyuara: 38, al-Mujadalahah: 11 & 9, serta Ali Imran: 158. Ketiga kunci di atas menggambarkan bahwa hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat harus ditentukan secara bijaksana melalui jalur musyawarah.

Sila kelima yang berbunyi, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia secara gamblang mengajarkan bahwa keadilan harus ditegakkan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan identitas lainnya. Berulang kali Allah memerintahkan untuk bersikap adil, seperti dalam surat An-Nisa: 58 & 135, Asyasyuura: 15. Bahkan, Allah tetap meminta jangan sampai kebencian terhadap seseorang ataupun kelompok membuat umat Islam tidak bisa bersikap adil, sebagaimana yang terekam dalam al-Qur'an surat al-Maidah: 08.

Alhasil, dari paparan di atas tak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa ummat Islam sebagai bangsa Indonesia wajib hukumnya untuk mencintai tanah air dan menjunjung tinggi kesepakatan-kesepakatan dalam bernegara, seperti Pancasila dan UUD 1945.

❖ **Kristen**

1. Kristen dan Nasionalisme

Nasionalisme Kristen tidak terlepas dari tradisi pemikiran politiknya yang merentang sejak Abad Pertengahan Masehi. Tradisi ini merupakan refleksi para teolog atas hubungan

antara agama dan negara, serta posisi pentingnya dalam pengamalan iman.

Sejarah pemikiran politik umat Kristen Indonesia baru muncul pada zaman pergerakan nasional. Kesadaran politik umat Kristen pada masa awal itu umumnya lemah akibat pembinaan *zending*, yang umumnya menjauhi politik (antara lain) karena alasan teologis (pengaruh Pietisme). Tokoh-tokoh Kristen yang berpolitik dalam partai Kristen tidak lagi terikat pada teokrasi formal, tetapi yang substansial. Setelah pengalaman panjang konflik gereja dan negara pada abad pertengahan, dan oleh pengaruh revolusi Perancis, gereja mengalami apa yang disebut pemisahan agama dan negara, sehingga perjuangan politik Kristen lebih bersifat umum dan terbuka. Artinya prinsip-prinsip Kristen dalam urusan politik, ideologi atau kenegaraan lebih menekankan esensi pemberlakuan kehendak Allah dalam lapangan politik daripada bingkai formalnya.¹

Menurut Saut Sirait, tradisi ini merujuk pada tiga tokoh besar, yakni Santo Agustinus, John Calvin dan Martin Luther. Agustinus merumuskan politiknya dalam dua tatanan kehidupan, yakni “Negara Tuhan” (*Civitas Dei*) dan “Negara Duniawi” (*Civitas Terrena*). Negara Tuhan berarti Gereja yang bertitik tolak dari konsep penebusan dosa melalui anugerah Tuhan yang hadir dalam diri Yesus dan Gereja. Sedangkan Negara Duniawi berguna untuk mengatur orang-orang jahat. Negara ini muncul akibat kejatuhan manusia dari surga karena dosa. Negara Duniawi

1. Harapan Nainggolan, *Critical Review* atas tulisan *Aktualisasi Nilai-nilai Agama Kristen untuk Memperkuat NKRI* dalam *Modul Aktualisasi Nilai-nilai Agama untuk Memperkuat NKRI* (2016), diselenggarakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Balitbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, pada 24 Oktober 2016 di Sahira Butik Hotel, Kota Bogor.

bersifat sementara sehingga tidak terlalu penting. Meski demikian, Augustinus menekankan pentingnya Negara Duniawi dalam rangka mewujudkan keadilan dan untuk membatasi wewenangnya dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah.

Mirip dengan konsepsi Agustinus tentang dua jenis tatanan kenegaraan di atas, Calvin melihat perbedaan mencolok dan memberi penekanan pada pentingnya kerajaan spiritual Tuhan. Calvin tetap menganggap penting kerajaan duniawi dan menjadikan manusia sebagai wakil Allah di muka bumi, sehingga memunculkan istilah *God Deputies* (Wakil Tuhan) atau *Holy Ministry* (Kementerian Suci). Calvin sangat menekankan pentingnya ketaatan kepada pemerintah atau penguasa. Tujuannya adalah agar tercapai tujuan kepentingan umum (*public good*) termasuk kepentingan untuk melindungi Gereja dan doktrin-doktrin agama.²

Sementara itu, Martin Luther, berbeda dengan dua teolog tersebut, menekankan pentingnya pemisahan antara Gereja dan negara. Pemisahan ini berimplikasi terhadap dua model etika yang berbeda, yakni sebagai warga Kristen dan warga negara. Sebagaimana dikutip Saut Sirait, Martin Luther menyatakan bahwa:

“We must divide all the children of Adam into two classes; the first belong to the Kingdom of God, the second to the kingdom of world. Those belong to the Kingdom of God are all true believers in the Christ and are subject to Christ. For Christ is the King and

2.Saut Sirait, *Politik Kristen di Indonesia, Suatu Tinjauan Etis*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012, h., 138

Lord in the Kingdom of God as the second psalm and all scriptures say”.³

(Kita harus membedakan semua anak Adam ke dalam dua kelompok; pertama yang termasuk ke dalam Kerajaan Tuhan, kedua ke dalam kerajaan dunia. Yang termasuk ke dalam Kerajaan Tuhan adalah semua orang yang percaya kepada Kristus dan menjadi subjek-Nya. Kristus adalah Raja dan Tuan di dalam Kerajaan Tuhan sebagaimana Mazmur dan semua Kitab Injil menyatakan).

Dengan pemahaman atas tiga gagasan tersebut, kita mengenal dua arus pemikiran penting dalam kekristenan. Pertama, yang menolak total keterlibatan Gereja dalam urusan politik dan negara. Kedua, yang menganjurkan agar Gereja terlibat aktif dalam politik. Yang menolak Gereja aktif dalam politik terbagi ke dalam dua kelompok: Monastisisme dan Mistisisme. Sikap kaum Monastis muncul dari kekecewaan terhadap perilaku politik umat Kristen yang korup, kompromotis dan pragmatis. Perilaku ini dianggap menyimpang dari ajaran Kristen dan tidak jauh beda dengan perilaku non-Kristen. Sementara itu Mistisisme menolak politik karena penolakannya terhadap dunia. Aliran ini sangat mementingkan pendekatan spiritual kepada Tuhan sembari mengabaikan urusan keduniawian. Tidak seperti Monastisme yang a-politis namun masih mengembangkan komitmen sosial; Mistisisme bersifat anti-politik dan anti-sosial.

Bukan sejak semula orang Kristen purba terlibat dalam politik. Hal ini disebabkan karena pemahaman eskatologisnya yang sempit tentang tibanya Kerajaan Allah

3.Sirait, *Politik Kristen di Indonesia*, h., 143

yang dinantikan dalam waktu yang sangat dekat. Dengan demikian, keprihatinan terhadap dunia tidak ada. Dalam salah satu doa yang ada dalam Kitab Didache (tahun 100M), kita menemukan dia ini : “Datanglah kerajaan-Mu dan biarlah dunia ini binasa”. Politik dilihat sebagai urusan duniawi yang sedang berlalu. Jadi jelas bahwa orang-orang Kristen mengambil jarak terhadap politik, namun pada saat yang sama mereka sebenarnya mempunyai pendirian-pendirian politik. Pengakuan Kristus adalah Kurios (Tuhan) menurut Filipi 2:11 pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan politik, atau lebih baik suatu pilihan politik. Mengapa demikian? Karena di atas takhta Romawi bertakhtalah pula seorang yang menamakan dirinya Kurios.⁴

Di pihak lain, mereka yang menganjurkan keterlibatan dalam politik, memiliki pemikiran lain. Mereka umumnya melihat keterlibatan dalam politik sebagai kelanjutan dari keterlibatan sosial Kristen. Peletak dasar pertama gerakan ini ialah Rauschenbusch dengan konsep Social Gospel. Ide ini lahir sebagai bentuk protes terhadap realitas sosial yang berkembang dalam konteks sejarah Amerika Serikat. Istilah “sosial” mencakup seluruh bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan lain sebagainya. Mereka melihat realitas sosial melalui pendekatan religius. Gerakan ini meyakini bahwa keberhasilan Kerajaan Allah dalam penyelamatan tatanan sosial sangat tergantung pada bagaimana pendekatannya terhadap seluruh tatanan lembaga sosial yang ada.

Dalam berbagai ekspresi dan manifestasinya, Kristen yang aktif berpolitik ini memiliki dua model pendekatan dalam partisipasi politik. Yakni model Yusuf-Daniel dan Musa-

4. A.A. Yewangoe, *Agama dan Kerukunan*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001, h., 164. Dikutip oleh Harapan Nainggolan, *Critical Review*, 2016

Elia. Model pertama lebih berorientasi pada pendekatan kekuasaan (power sentric orientation) yang dilakukan kalangan elite intelektual dan pemimpin politik Kristen. Dalam pendekatan ini, para pemimpin Kristen terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan negara melalui jabatan politik. Sementara itu dalam model Musa-Elia, pendekatan yang dipakai adalah dengan memperkuat basis komunitas melalui advokasi (*advocacy*), pemberdayaan (*empowering*) dan penciptaan solidaritas (*solidaritimaking*). Model kedua ini banyak dilakukan oleh kalangan Gereja dan individu Kristen yang memiliki kepedulian sosial, maupun lembaga-lembaga Kristen.⁵

Dalam model Musa-Elia inilah, politik Kristen diamalkan di Indonesia. Demi hal ini, kaum Kristen telah melepaskan diri dari paham pietisme (kesalehan personal) awal yang dibawa oleh zending Eropa Lutheran ke Indonesia. Paham ini menekankan kesalehan pribadi dan anti terhadap politik. Bergumulan dengan kolonialisme Belanda membuat kaum Kristiani pribumi mengalami pergulatan teologis, demi pembelaan atas tanah air. Ini yang membuat para pendeta Gereja Gereformeerd mendirikan Christelijk Ethische Partij (CEP, Partai Etis Kristen) pada 1917 yang ikut mendorong imajinasi akan Indonesia merdeka. Salah satu pendetanya, Pdt. Basoeki Probowinoto dari Gereja Kristen Jawi Wetan kemudian mendirikan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) setelah di masa muda melakukan reinterpretasi atas Surat Roma 13, yang melarang perlawanan kepada pemerintah karena ia merupakan hamba Tuhan yang diberi kekuasaan oleh-Nya.

5.Syahdatul Kahfi, *Kristen-Politik dan Politik-Kristen dalam Sketsa Sejarah di Indonesia*, Reform Review Vol. 1 No. 1 April-Juni 2007, h., 74-76

Secara historis, nasionalisme Kristen dapat dilihat dalam sejarah perjumpaannya dengan proses kemerdekaan Indonesia. Dalam kerangka konfrontasi Belanda-Indonesia di wilayah Indonesia Timur, antara tahun 1946-1950 misalnya, pihak Belanda mendirikan sebuah negara, yakni Negara Indonesia Timur (NIT). Di wilayah ini pula terdapat gerakan kebersamaan Gereja dan Zending dalam rangka pergerakan kebangsaan yang cukup kuat sejak tahun 1930-an.

Pada Maret 1947, wakil-wakil Gereja dan Zending melangsungkan suatu konferensi di Malino. Konferensi Malino ini juga memberi perhatian pada kenyataan politik berdirinya NIT itu dan membahas hubungan Gereja dengan bangsa dan negara. Ceramah pengantar untuk pokok ini disampaikan oleh Pdt. M. Sondakh yang membedakan negara sebagai “persekutuan hukum” dan Gereja sebagai “persekutuan keampunan”, namun keduanya berhubungan berdasarkan tanggung jawab politik Kristen.

Maka tugas Gereja adalah menyaksikan cinta kasih Allah di dalam hukum negara, dalam arti, negara agar menjadi suatu negara hukum (*rechtsstaat*), di mana hak-hak manusia dihormati, bukan saja dalam pikiran namun hingga dalam praktik. Dengan itu maka pemberitaan Injil memperoleh kebebasan dalam kehidupan bernegara. Pemahaman konferensi tentang hal ini dirumuskan dalam laporan seksi Gereja, Bangsa dan Negara. “Rumusan Malino” tersebut terdiri atas enam butir, meliputi:

- (1) Kesaksian tentang ketuhanan Yesus Kristus dalam tugas Kristen terhadap bangsa dan negara;
- (2) Perbedaan Gereja sebagai persekutuan keampunan dengan negara sebagai persekutuan hukum;

- (3) Orang Kristen bebas berpolitik, tetapi dalam ketaatan kepada Tuhan Allah lebih daripada ketaatan kepada manusia;
- (4) Tugas-tugas Gereja dalam pembentukan negara Indonesia merdeka;
- (5) Kesiediaan orang Kristen bekerjasama dengan sesama warga negara yang beragama lain dalam membangun bangsa; dan
- (6) Penolakan suatu Kementerian Agama atau Dewan Agama di Indonesia bagian Timur.⁶

Butir (4) mengenai tugas Gereja dalam pembentukan negara Indonesia merdeka, berisi:

Berhubungan dengan soal-soal pembentukan Negara Indonesia yang merdeka, maka tugas Gereja yang terpenting ialah:

- a. Memberitakan dan menyaksikan dengan sekuat-kuatnya dan sebebaskan-bebasnya ke seluruh lapangan hidup, bahwa Yesus Kristus Tuhan adanya.
- b. Mengusahakan sekuat-kuasanya supaya Negara Indonesia yang merdeka itu, menjadi suatu negara-hukum (*rechtsstaat*).
- c. Mengusahakan sekuat-kuasanya kebebasan agama selaku aturan dikalimatkan dengan seluas-luasnya dan betul, dalam Pokok Undang-Undang Negara Indonesia yang merdeka menurut paham Gereja-gereja Kristen, seperti ditafsirkan dalam "*Statement on religious Liberty*" (1944), yang berbunyi:

"Kebebasan agama haruslah diterangkan seperti berikut. Bahwa hal itu mengandung kebebasan berbakti setuju dengan angan-angan hati dan mendidik anak-anak di dalam kepercayaan orang tua mereka; kebebasan kepada tiap-tiap oknum untuk berpindah agama;

6. Saut Sirait, *Politik Kristen di Indonesia*, h., 197

kebebasan berkhotbah, mendidik, menyiarkan dan menjalankan usaha-usaha pengutusan Injil; kebebasan akan berorganisasi dengan orang-orang lain dan memiliki serta mengusahakan perbendaharaan untuk maksud-maksud ini”.

- d. Menginsafkan selalu dengan sekuat-kuatnya akan arti tertib yang sungguh (*orde*), yaitu tertib menurut hukum yang sungguh (*recht*).

Butir mengenai tugas Gereja dalam pembentukan negara ini memang dibarengi dengan tuntutan kebebasan beragama. Masalah ini telah dibahas pada Konferensi Zending di Batavia pada Agustus 1946. Dua bulan sebelumnya, Contact-Comite telah menyiapkan suatu nota berjudul “*De Vrijheid van Godsdiens in het toekomstige Indonesie*”, yang disampaikan kepada pemerintah Belanda. Dengan catatan pengantar dan penjelasan dari J.C. Hoekendijk atasnya, nota tersebut menjadi masukan pada Konferensi Batavia 1946. Tekanan utama dalam nota itu adalah supaya kebebasan Gereja dan orang Kristen, sebagai golongan minoritas, dijamin dalam struktur politik masa depan Indonesia.⁷

Nasionalisme Kristen tidak hanya bisa dijumpai dalam penghadapannya dengan kolonialisme Belanda, tetapi juga dalam proses “nasionalisasi” Gereja-gereja, dari sifat kesukuan, menjadi kesadaran nasional Gereja-gereja. TB. Simatupang dalam *Iman Kristen dan Pancasila* (1984) sebagaimana dikutip oleh Martin L. Sinaga menggambarkan proses nasionalisasi ini. Menurut Simatupang, Gereja di Indonesia telah memiliki kesadaran untuk beranjak dari “Gereja suku” kepada Gereja yang “mengindonesia”.

7. Zakaria J. Ngelow, *Kekristenan dan Nasionalisme, Perjumpaan Umat Kristen Protestan dengan Pergerakan Nasional Indonesia 1900-1950*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011, h.,191-193

Mereka terlibat dalam gerakan oikoumenis (proses menyatu lintas Gereja) yang antara lain didorong oleh pembangunan (modernisasi). Akar-akar etnis akibat pembentukan *volkskirchen* (Gereja-suku) mulai ditinggalkan.

Proses ini kemudian paralel dengan terbentuknya Indonesia sebagai sebuah bangsa. Proses nasionalisasi ini dibarengi dengan kritik terhadap tradisi pietisme (kesalehan rohani) yang a-politik, dan tendensi misionaris Barat yang sekadar menjalankan misi untuk melayani tata hidup kolonial dan kapitalis. Dalam kondisi ini terjadilah benturan antara Gereja-gereja permulaan yang mempunyai orientasi pietistis, kesukuan dan kepemimpinan misionaris Barat, dengan generasi muda Kristen Indonesia yang semakin tertarik dengan nasionalisme dan keterlibatan yang kuat dalam masalah-masalah kesamaan rasial dan keadilan.

Dalam hal ini, pembentukan Dewan Gereja Indonesia (sekarang PGI: Persekutuan Gereja-gereja Indonesia) merupakan pelembagaan kesatuan Gereja-gereja, dengan tujuan pembentukan Gereja Kristen Yang Esa di Indonesia, berbasis “Pengakuan Iman Bersama” umat Kristiani.⁸

Perkembangan dan praktik historis nasionalisme inilah yang menjadi pijakan bagi politik Kristen di Indonesia kemudian hari, yang konsepsinya telah dirumuskan oleh PGI. Dalam Forum Konsultasi Teologi di Sukabumi tahun 1970, ditetapkanlah "Pergumulan Rangkap" yang menempatkan misi gereja tidak hanya dalam pergumulan keruhanian tetapi juga sosial-politik. Secara konseptual doktrinal, hal ini dirumuskan pada Sidang Raya PGI 1984 di Ambon yang

8.Martin L. Sinaga, *Kristiani dan Agama Publik, Peta Persoalan dan Prospeknya di Indonesia*, Reform Review Vol. 1. No. 1 April-Juni 2007, h., 15-16

melahirkan pemikiran politik Kristen Indonesia, sebagai berikut: *"Dalam penantian penggenapan rencana penyelamatan Allah itu, Allah menetapkan pemerintah sebagai hamba-Nya, yang diperlengkapi dengan wewenang untuk memuji perbuatan baik dan menghukum perbuatan jahat (Roma 13:1-7). Tetapi pemerintah dapat juga menyalahgunakan kuasanya itu (Wahyu 13). Oleh sebab itu, gereja terpanggil untuk mendoakan dan membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah demi kebaikan semua orang, dan ikut menjaga agar pemerintah tidak menyalahgunakan kuasa yang diberikan Allah kepadanya (1 Timotius 2:1-2). Apabila pemerintah melampaui batas kekuasaannya, maka orang-orang percaya harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia" (Kisah Para Rasul 5:29).*

Dalam konteks NKRI, konsep politik ini kemudian dipraksiskan oleh PGI dalam PTPB tahun 2009. Rumusan tersebut memuat: *"Gereja mempunyai tanggung jawab politik dalam arti turut serta secara aktif dalam mengupayakan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memperjuangkan keseimbangan antara kekuasaan (power), keadilan (justice) dan kasih (love). Orang Kristen terpanggil untuk membangun kesejahteraan bersama".⁹*

Dari rumusan ini, terdapat beberapa hal yang menarik. *Pertama*, kekristenan menempatkan pemerintah sebagai hamba Tuhan. "Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan", demikian salah satu prinsipnya. Akan tetapi, pemahaman ini dibarengi dengan kewaspadaan akan potensi pemerintah untuk menyimpang dari tujuan yang selaras

9. Richard M. Daulay, *Agama dan Politik di Indonesia, Umat Kristen di Tengah Kebangkitan Islam*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015, h., 93-96

dengan nilai-nilai kekristenan. Jika hal ini terjadi, maka umat Kristen harus lebih takut dengan Tuhan daripada dengan pemerintah.

Mengenai hubungan gereja-negara ini dikemukakan dengan konsep : Pancasila memahami hubungan gereja-negara sebagai hubungan kemitraan yang setara dan timbal balik. Artinya, baik agama maupun negara mempunyai fungsi, wewenang dan kedaulatannya masing-masing yang wajib dihormati dan tidak boleh dicampuri oleh pihak lain. Orang Kristen dipanggil untuk menjadi warga negara yang patuh (bnd. Mat. 22:15-22; 1 Tim.2:1-4), tetapi kepatuhan itu ada batasnya, yakni sejauh Pemerintah sungguh-sungguh melaksanakan keadilan. Colum sebagaimana dikutip buku Agama dan Dialog misalnya berpendapat bahwa kedua lembaga itu, agama dan negara memang berbeda, namun keduanya memperoleh otoritasnya dari satu sumber, yaitu Allah dan keduanya mengemban satu panggilan pokok melayani Tuhan Allah yang satu. Dengan begitu, orang-orang Kristen harus sama tekunnya melaksanakan tanggung jawabnya baik sebagai warga negara maupun sebagai warga gereja. Ada hubungan koordinatif antara Gereja (baca: agama) dan negara. Jadi orientasi yang seharusnya dipegang baik oleh agama maupun oleh negara adalah bagaimana melayani Tuhan dan bagaimana melayani umat sebaik-baiknya.

Seruan Paulus dalam Roma 13 agar taat pada pemerintah Romawi disebabkan karena jemaat Kristen merupakan minoritas di tengah penduduk Romawi yang mayoritas non-Kristen. Dasarnya adalah keyakinan bahwa bagaimanapun pemerintah adalah “tangan Allah” yang menegakkan dan mempertahankan keadilan. Tetapi tentu saja tetap perlu bersikap kritis. Dengan demikian, politik tidak dilihat

sebagai suatu kenyataan demonis, tetapi dipandang sebagai kenyataan manusiawi. Disini kehadiran pemerintah dibutuhkan untuk meniadakan hal-hal yang bersifat demonis tersebut, dan hukum dibutuhkan untuk mengatur kehidupan masyarakat.¹⁰

Kedua, rumusan pemikiran politik Kristen Indonesia yang telah diterapkan dalam konteks Pancasila dan UUD 1945 yang mengerucut pada tiga nilai; kekuasaan, keadilan dan kasih dengan muara utama kesejahteraan bersama. Ketiga nilai yang menjadi perasan Pancasila dan UUD 1945 ini menarik, sebab ia mengakui kekuasaan sebagai pranata yang dibutuhkan untuk menegakkan keadilan dan kasih. Sedangkan penempatan kesejahteraan bersama sebagai muara dari keadilan, menunjukkan sifat praksis nilai kasih, yang tidak abstrak melainkan konkret, karena ia berbentuk kesejahteraan bersama.¹¹

2. Kristen dan Pancasila

Alkitab dengan jelas mencatat dalam Roma 13:1-7 bahwa tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barangsiapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman. Umat Kristen harus meyakini dan melakukannya dengan penuh tanggungjawab. Hal ini bukan berarti bahwa umat Kristen

10 . Harapan Nainggolan, *Critical Review*, 2016

11. Wawancara dengan Pdt. Celicius Bonar dari PGIS Kota Bogor, 8 Juni 2015. Riset *Aktualisasi Nilai-nilai Agama Kristen dalam Memperkuat NKRI*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2015, oleh Syaiful Arif dan Kustini.

menyerahkan diri kepada negara, tetapi ia menyerahkan diri kepada imannya, yang mengajarkan untuk menjadi warga negara yang baik. Sebagai bagian dari lembaga keagamaan milik masyarakat, Gereja sadar bahwa agama Kristen bukanlah agama negara tetapi merupakan bagian dari negara, di mana Kristen turut untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.

Iman Kristen tidak mewajibkan orang-orang Kristiani untuk membangun negara Kristen melainkan mengajarkan umatnya untuk bersama-sama dengan masyarakat Indonesia lainnya untuk membangun bangsa. Iman Kristen dengan Pancasila tidak dapat dicampuradukan, karena masing-masing mempunyai falsafah tersendiri, namun di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai Iman Kristen. Dalam pemahaman seperti inilah, setiap orang sebagai umat Kristen berpartisipasi sepenuhnya dalam usaha bangsa dan negara untuk melanjutkan pembangunan nasional sebagai pengamalan dari sila-sila Pancasila.¹²

Umat Kristen dalam iman yang diyakininya mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan moral bangsa karena apa yang dijabarkan oleh Pancasila mengenai nilai-nilai hidup, tercermin dalam iman Kristen. Oleh karena itu, maka iman Kristen harus menjadi pedoman bagi warga Gereja dalam mengamalkan Pancasila. Jika diteliti, setiap butir dalam Pancasila ternyata tidak bertentangan dengan Alkitab. Berikut penjelasannya:

12. AA. Yewangoe, *Iman, Agama dan Masyarakat dalam Pancasila*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002, h., 35

- (1) *Ketuhanan Yang Maha Esa*. Alkitab menegaskan bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah Tuhan pencipta langit dan bumi beserta segala isinya (Mazmur 121:1-2), dan Tuhan Yang Maha Esa adalah Tuhan Yang Maha Kasih (1 Yohanes 4:8). Sila pertama ini artinya Indonesia mengakui hanya ada satu Tuhan saja (Ulangan 6:4, Markus 12:29) walaupun berbeda-beda agama. Karena itu saling menghormati dan saling tenggang rasa satu dengan yang lain antar agama adalah bagian dari Butir-butir Pancasila.
- (2) *Kemanusiaan yang adil dan beradab*. Alkitab mencatat bahwa manusia itu agung dan mulia karena manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang dibentuk atau diciptakan Allah dengan istimewa (Kejadian 2:7; Mazmur 8:4-6, Matius 22:37-40).
- (3) *Persatuan Indonesia*. Alkitab mengingatkan bahwa tidak ada seorangpun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri (Roma 14:7-8, Mazmur 133:1 (sungguh alangkah baik dan indahny bila saudara hidup rukun), Roma 15:5).
- (4) *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan*. Alkitab menjelaskan bahwa orang Kristen seharusnya bersandar pada hikmat Tuhan serta tidak bergantung pada kepandaian diri, selain itu juga dalam merencanakan sesuatu untuk kepentingan bersama perlu untuk didiskusikan bersama (Amsal 24:3-7, Filipi 2:2 – hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih satu jiwa dan satu tujuan).
- (5) *Keadilan Sosial bagi Rakyat Indonesia*. Alkitab memberikan instruksi yang sama di mana orang Kristen diminta untuk menunjukkan keadilan kepada

orang lemah, anak yatim, orang sengsara dan orang kekurangan (Mazmur 82:3, Maz. 72; Yesaya 11:1-10, Roma 15:1).¹³

❖ Katolik

Dalam kaitan dengan nasionalisme, Gereja Katolik di Indonesia termasuk di Kota Salatiga begitu sangat mencintai tanah air dan negara Indonesia. Bahkan Gereja Katolik mendorong umat Katolik untuk mempunyai dan menjunjung tinggi sikap nasionalisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (Antonius Subagyo dan FX Wahyu Nugroho. Wawancara. 8 Juni 2015). Menurut kedua tokoh Katolik tersebut, sesungguhnya kecintaan terhadap tanah air dan negara sudah disabdakan oleh Yesus:

“Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” (Matius 22 : 21; Markus 12 : 17; Lukas 20 : 25)

Sabda Yesus ini kemudian diteruskan oleh para Rasul/para Murid-Nya, terutama Petrus yang diberikan tugas oleh Yesus untuk menggembalakan domba-domba-Nya. Surat Petrus yang pertama kepada umat yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, mengatakan:

“Tunduklah karena Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada Raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi,

13. Wawancara dengan Pdt. Kristanto, GBI, 10 Juni 2015. Riset Aktualisasi Nilai-nilai Agama Kristen dalam Memperkuat NKRI, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2015, oleh Syaiful Arif dan Kustini.

maupun kepada wali-wali yang diutusnyanya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik ” Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja (1 Petrus 2 : 13; 17)

Dari sabda Yesus yang diteruskan oleh Petrus, sangatlah jelas bahwa Gereja Katolik hadir di dunia ini di negara Indonesia demi keselamatan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Gereja Katolik sangat mencintai negara di mana Gereja Katolik hadir. Bagi Gereja Katolik Indonesia, semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air dan negara sudah ditunjukkan sejak negara ini terbentuk. Semangat nasionalisme ini telah dicontohkan oleh Tokoh Gereja Katolik, Monsinyur Soegijapranata yang sangat menentang penjajahan, penindasan yang berakibat pada perendahan martabat manusia dan menghilangkan kemerdekaan pribadi sebagaimana jelas diajarkan dalam agama Katolik:

“Allah menciptakan setiap manusia sebagai makhluk yang bermartabat, sebab manusia diciptakan oleh Allah menurut citra-Nya (bdk. Kejadian 1 : 26-27)”

Atas dasar itulah, Monsinyur Soegijapranata sangat menentang adanya penjajahan di bumi Nusantara sehingga mendorong dirinya melakukan perlawanan bukan sebagai pribadi melainkan perjuangan atas nama Gereja Katolik Indonesia untuk Indonesia tercinta. Kecintaan Gereja Katolik Indonesia terhadap tanah air dan negara Indonesia sungguh diwujudkan secara nyata dalam kehidupan Gereja Katolik Indonesia. Gereja Katolik Indonesia mengamini bahwa kemerdekaan Indonesia sungguh merupakan berkat dan

rahmat Allah dan menyadari sepenuhnya bahwa ada campur tangan Allah dalam setiap perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Untuk itu, kecintaan dan nasionalisme tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk sesuai dengan budaya setempat yang ada di Indonesia. Hal ini nampak pada penggunaan bahasa Indonesia bahkan bahasa daerah di mana Gereja Katolik hadir dalam bahasa Liturgi maupun kitab suci. Selain itu, Gereja Katolik menjadikan Hari Raya Kemerdekaan RI sebagai bagian dari Hari Raya dalam Kalender Liturgi Gereja Katolik.

Penempatan perayaan Hari Raya Kemerdekaan RI sebagai bagian dari Hari Raya dalam Kalender Liturgi Gereja Katolik yang memiliki posisi kesakralan dalam peribadatan umat Katolik menunjukkan bahwa Gereja Katolik begitu memosisikan perayaan kemerdekaan sebagai bagian dari peribadatan sekaligus rasa syukur atas berkat dan rahmat Allah. Ini tentu menjadi bagian tidak terpisahkan dari ekspresi umat Katolik dalam menghayati nasionalisme Indonesia dalam kehidupan keberagamaan umat Katolik (FX. Wahyu Nugroho dan Antonius Subagyo. Wawancara. 8 Juni 2015). Dalam kalender Liturgi disebutkan dengan jelas bahwa menurut Konferensi Wali Gereja Indonesia Tahun 1972, Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan sebagai hari raya (Solemnitias) (Kalender Liturgi Agustus 2015: 42).

Di samping itu, ekspresi lain yang menunjukkan kecintaan umat Katolik terhadap tanah air dan negara Indonesia adalah adanya bendera negara di dalam gereja Katolik Santo Paulus Miki. Dahulu memang ada bendera Vatikan di dalam gereja, namun saat ini sudah tidak ada pasca pasca Konsili Vatikan II tahun 1962 – 1965. Bahkan bendera Republik Indonesia ini

pada saat Perayaan Misa ditempatkan secara khusus di altar gereja. Demikian pula halnya lagu-lagu kebangsaan seperti lagu satu nusa satu bangsa, lagu syukur dinyanyikan dalam perayaan misa tersebut untuk memberikan penerangan kepada umat Katolik atas rasa syukur dengan adanya kemerdekaan (FX. Wahyu Nugroho dan Antonius Subagyo. Wawancara. 8 Juni 2015).

Atas uraian di atas, maka jelaslah bahwa nasionalisme tidak bertentangan sama sekali dengan agama Katolik, justru Agama Katolik memberikan inspirasi dan penghargaan atas sikap nasionalisme, dalam hal ini kecintaan terhadap tanah air dan bangsa Indonesia.

❖ Hindu

- A. Pandangan Hindu tentang kewilayahan dan keumatan diejawantahkan secara eksplisit melalui konsep *Tri Hita Karana*, yaitu konsep yang menjelaskan bahwa umat manusia akan mendapatkan kebahagiaannya jika hidup harmoni dengan alam dan lingkungannya, dengan sesama manusia dan dengan Tuhan. Secara praktik, konsep ini dituangkan dengan konsep *palemahan*, *pawongan* dan *parhyangan*. Ketiga konsep ini diimplementasikan ke dalam hidup bermasyarakat, mulai dari rumah tinggal hingga ke *desa pakraman*.

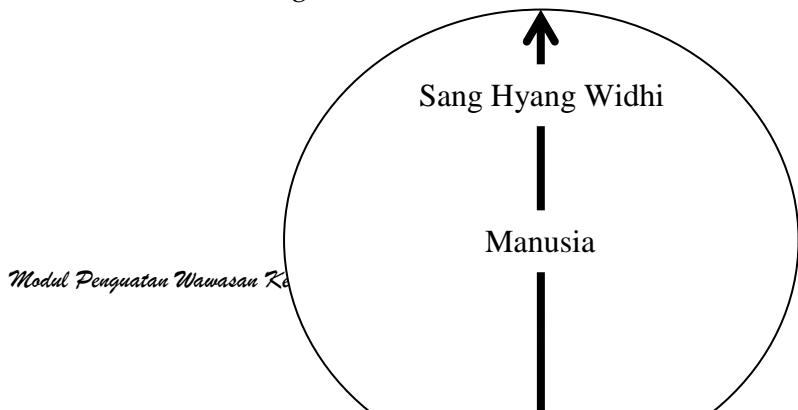
Secara konkrit, konsep *Tri Hita Karana* tersebut dilaksanakan secara seimbang baik vertikal maupun horizontal. Menjaga hubungan harmoni dan seimbang dilakukan dengan *pertama*, kepada Tuhan atau *parahyangan*, seperti sembahyang, melaksanakan hari raya suci dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan manusia kepada Tuhan. *Kedua*, kepada sesama manusia atau *pawongan*, seperti aktivitas sosial,

budaya dan kegiatan kemanusiaan lainnya. *Ketiga*, kepada alam semesta atau *palemahan*, seperti kerja bakti membersihkan lingkungan mulai dari rumah, tempat suci, menjaga kesuburan tanah, tumbuhan dan binatang serta kegiatan yang berkenaan dengan pelestarian lingkungan.

Begitu juga tempat tinggal umat Hindu. *Tri Hita Karana* diatur dengan mengikuti konsep *teben* dan *luhur*. Wilayah *teben* adalah tempat tinggal manusia (*paowongan*) dan tersedianya tanah kosong untuk lingkungan (*palemahan*), sedangkan area *luhur* adalah tempat suci (*parahyangan*). Sementara di *desa pakraman* juga terbagi-bagi atas *palemahan*, seperti *karang suwung* atau area kosong, *paowongan*, seperti tempat tinggal warga atau penduduk dan *parahyangan*, yaitu wilayah di mana tempat suci atau pura didirikan.

Dengan demikian, konsep *Tri Hita Karana* dijalankan umat Hindu tidak semata secara vertikal hanya kepada Tuhan tetapi juga horizontal kepada sesama manusia baik interumat Hindu maupun antarumat manusia lainnya, serta dengan alam lingkungan. Artinya terdapat korelasi yang saling melengkapi dan seimbang dari hubungan baik vertikal (Tuhan) maupun horizontal (manusia dan alam), yang secara simbolik dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

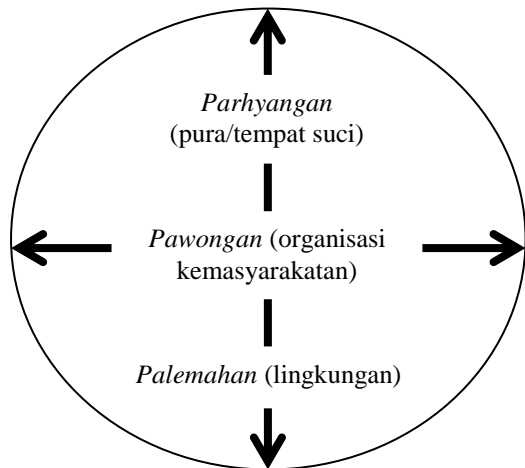
Gambar: Pola Hubungan dalam *Tri Hita Karana*





Alam/Lingkungan

Gambar: Pola Pemukiman umat Hindu



Dalam beberapa kitab suci, umat Hindu diajarkan untuk selalu menghormati dan mencintai lingkungan wilayah tanah airnya. Misalnya dalam **Atharwaweda. V.VI.21.1** yang berbunyi “Tanah Air adalah negeri tercinta yang utama di bumi ini”. **Atharwaweda. V.XII.1.12**: “Bumi ini adalah Ibu dan kami adalah putra dari Ibu Periwī”, dan **Atharwaweda V.XII.10.12**: “Bumi yang luas ini adalah Ibu dan kerabat kami, langit adalah ayah, pelindung, asal dan

pusat kelahiran kami”, serta **Yajurveda IX.22**: “Kami menghormati Ibu Pertiwi”.

Masih ada beberapa justifikasi dari kitab suci tentang pandangan Hindu terhadap tema ini. Kita bisa mulai dengan pandangan bahwa Hindu menyatakan sesungguhnya manusia tidak pernah merasa terpisah dengan seluruh isi alam semesta. Misalnya, saat kehadiran manusia pada jaman *Kertayuga*, manusia membawa secara utuh sifat-sifat dewatanya atau kesadaran *atma*. Semua kebutuhan manusia dilayani oleh energi kosmis dalam bentuk *prana* yang meresap dalam partikel elektron atom *asta prakrti*. Uraian ini dinyatakan dalam **Bhagavadgita (VII.5)** yang menyatakan “Semua elemen atau unsur *asta prakrti* patuh dengan dharmanya, dengan cara beresilasi (bergetar) dan merambat ke segala penjuru dunia, untuk segera memenuhi kebutuhan seluruh makhluk tiada kecuali.”

Setiap butir partikel elektron atom melayani dengan kasih sayang seluruh makhluk. Tidak satu makhluk pun mengalami kesusahan pada jaman *Kertayuga* itu. Orang-orang suci, seperti *Rsi* atau *Yogi* mengalami kesadaran kosmis jagat raya. Oleh karenanya, orang-orang suci seperti itu memiliki kualitas cinta kasih universal yang tidak terbatas. Mereka mengejawantahkan sifat-sifat Tuhan dalam hidupnya. Mereka mencintai seluruh umat manusia dan seluruh makhluk, bahkan kepada benda mati dan seluruh ciptaan Tuhan lainnya. Inilah yang disebut tingkat kesadaran jagat raya. Bhagavadgita mengajarkan manusia untuk dapat mencapai puncak kesadaran kosmis, yakni kesadaran jagat raya.

Dengan kesadaran kosmis, manusia tidak akan mau merusak alam semesta, karena jika itu dilakukannya berarti manusia telah merusak badan Tuhan dan badannya sendiri. Jika alam semesta rusak, manusia tidak akan bisa dapat hidup nyaman di atas bumi dan melangsungkan hidupnya. Manusia tidak akan mampu mempersembahkan *yadnya* kepada Tuhan karena alam sudah tidak mampu menyediakan bahan yang dibutuhkan manusia. Sekali lagi, jika manusia merusak dan menyakiti alam semesta, manusia telah mengkhianati Tuhan yang telah melahirkan diriNya sendiri bersama makhluk hidup lainnya.

Dalam banyak mantra Veda diajarkan bahwa setiap lapisan bumi itu terdapat kemahakuasaanNya. Dengan demikian, lapisan bumi itu pun menjadi sumber hidup yang memberikan berbagai sumber material kepada manusia. Unsur-unsur alam di bumi seperti ini ini wajib untuk dilindungi, sebagaimana diajarkan dalam kitab **Rgveda (III.51.5)**: “Lindungilah sumber-sumber kekayaan alam seperti atmosfir, tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan berhasiat obat, sungai-sungai, sumber-sumber air dan hutan-hutan belantara.”

Bunyi mantra Veda tersebut mendorong agar umat manusia berbuat nyata untuk melindungi bumi dengan segala kekayaan yang ada di dalamnya. Kitab **Yajurveda XVIII. 13** menyatakan bahwa di dalam bumi ini tersembunyi berbagai macam jenis logam: “Semoga kami memperoleh logam-logam yang terkandung didalam bumi, yaitu emas, besi, tembaga, baja, logam merah, timah hitam, seng dan timah putih.” Sementara kitab **Atharvaveda**

XII.1.37 menyatakan bahwa “Bumi bergerak karena ada api di dalam bumi dan air atau samudra.” Demikian juga dalam **Rgveda VIII.40.4** menyatakan bahwa dalam “Bumi dan langit ada kekayaan tersembunyi.”

Dalam pandangan Hindu, kepercayaan animisme bukan sebuah kepercayaan yang hina. Penganut Hindu yang memuja Tuhan dalam segala ciptaanNya tidak akan dianggap sebagai orang yang sesat, sebab Tuhan memang ada dalam seluruh ciptaanNya. Konsep ini menjadi dasar kosmologi Hindu yang menyatakan alam semesta itu hidup, berjiwa atau bernyawa. **Bhagavadgita XV.13** mempertegas maksud ini dengan pernyataan: “Setelah masuk kedalam Bumi, Aku pelihara semua insan dengan energiKu, setelah menjadi cairan soma, Aku hidupi tumbuh-tumbuhan semua”. Hal yang sama dapat dibaca dalam **Isopanisad 1** yang menyatakan: “Ketahuilah bahwa semua yang ada ini dibungkus oleh Tuhan. Karena itu temukanlah kebahagiaanmu pada keterlepasan dan jangan menginginkan sesuatu yang menjadi hak orang lain”.

Dalam uraian sloka **Bhagavadgita** dan mantram **Upanisad** di atas, menjadi cara **umat Hindu** meyakini bahwa Tuhan ada di dalam setiap benda. Kalimat dalam **Bhagavadgita** yang menyatakan bahwa “Setelah masuk ke dalam Bumi, Aku pelihara semua insan dengan energiKu” telah memberitahukan kepada manusia bahwa Tuhan memanifestasikan diriNya dalam daya-daya (energi alam, dinamisme) setelah masuk ke dalam alam atau bumi. Hal ini akan segera dapat dimengerti bahwa daya kohesi atau energi ikat antaratom-atom molekul semua benda, baik gas, cair dan padat merupakan energi Tuhan, karena Tuhan

sendiri masuk ke dalamnya. Hal ini dapat ditemukan dalam pernyataan *atmaivedam sarvam iti*, artinya “atma sesungguhnya adalah seluruh alam ini” (**Chandogya Upanisad VII.25.2**).

Manusia dan wilayah lingkungan hidupnya memiliki hubungan sangat erat. Keduanya saling memberi dan menerima pengaruh besar satu sama lain. Pengaruh alam terhadap manusia lebih bersifat pasif, sedangkan pengaruh manusia terhadap alam lebih bersifat aktif. Manusia memiliki kemampuan eksploitatif terhadap alam sehingga mampu mengubahnya sesuai yang dikehendaknya. Dan walaupun alam tidak memiliki keinginan serta kemampuan aktif-eksploitatif terhadap manusia, namun pelan tapi pasti, apa yang terjadi pada alam, disadari atau tidak disadari, akan terasa pengaruhnya bagi kehidupan manusia.

Tindakan eksploitatif-manipulatif terhadap alam akan mengakibatkan kerusakan langsung terhadap alam, dan secara tidak langsung hal itu akan berdampak negatif bagi kehidupan manusia khususnya, dan kehidupan berbagai makhluk lain pada umumnya. Sebaliknya, apabila manusia menunjukkan kasih sayang yang besar terhadap alam, dengan memelihara dan melestarikannya, maka alam akan menjamin kelangsungan hidup manusia dalam suasana nyaman dan menyenangkan. Dengan demikian, menyakiti dan melukai alam semesta, sama saja telah menyakiti dan melukai Tuhan.

Dalam konsep *Tri Hita Karana*, alam, tumbuhan, hewan, dan manusia harus harmoni dalam satu kesatuan, sebagai

sebuah siklus kehidupan yang tidak terputus. Walaupun manusia memiliki kekuatan berjalan, melihat, mendengar, bercakap-cakap, dan seterusnya, tetapi mata tidak melihat sendiri, telinga tidak mendengar sendiri, namun dipekerjakan oleh manusianya. Ada kesatuan dan keseluruhan pada manusia. Jadi, hubungan manusia dengan alam semesta menunjukkan bahwa segala kekuatan alam semesta terdapat juga pada diri manusia.

Jika di alam ada angin, pada manusia ada nafas. Ada matahari yang bersinar pada alam, ada mata yang bersinar pula pada manusia. Alam mempunyai bumi dan tumbuh-tumbuhan, manusia mempunyai badan. Badai topan pada alam dipersamakan dengan kemarahan pada manusia. Sifat-sifat alam ada pada manusia, begitu juga sebaliknya. Kenyataan ini mempertegas kalimat bahwa "*Atman* adalah *Brahman*, dan *Brahman* adalah *atman* juga". Manusia dan alam bukanlah dua hal, melainkan satu hal.

Brahman atau *atman* adalah pusat alam sekaligus pusat manusia, tetapi dalam diri manusia, kesadaran tentang *atman* atau *Brahman* terbungkus ketidaktahuan (*avidya*). Jika manusia ingin merasakan dan mengalami kesatuannya dengan *Brahman*, maka ia harus merasakan kesamaannya dengan yang satu. Untuk itu, ia harus menyelami dirinya sendiri. Dalam pandangan filsafat Hindu, barang siapa yang mengenal dirinya yang sebenarnya, melihat serta mengetahui sungguh-sungguh, maka ia mengenal dunia, dan mengenal *atman*, oleh karenanya ia mengenal *Brahman* (Tuhan).

Dari uraian pernyataan tersebut di atas, jelas bahwa manusia wajib menjalankan sifat-sifat kedewataannya kepada sesama manusia, alam dan Tuhan sebagaimana diamanatkan **Bhagavadgita (XVI.3)**. Tanpa adanya kesadaran bahwa manusia memiliki tugas sebagai penjaga bumi ini, maka bumi ini akan segera lenyap dihabiskan oleh keserakahan dan kelobaan manusia yang tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk.

Dalam kitab **Purana** diceritakan bahwa pada zaman Dwapara, ibu pertiwi sangat kewalahan mendukung bumi tempat hidupnya semua makhluk. Mengapa demikian? Karena manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling utama sudah banyak berperilaku menyimpang. Berdasarkan kisah ini, manusia perlu mengingat kembali apa yang dinyatakan dalam **Atharwaveda (XII.1.1)** yang menyatakan bahwa ada enam perilaku manusia yang dapat mendukung tegaknya fungsi bumi sebagai wadah kehidupan, yaitu *satya* (kebenaran), *rta* (hukum alam), *tapa* (pengendalian nafsu), *diksa* (penyucian diri), *brahma* (berdoa) dan *yadnya* (ikhlas berkorban). Inilah enam hal yang wajib dilakukan untuk menyangga kesucian bumi (*prthivim dharayante*) agar tetap terjaga dan alam selalu harmoni dengan manusia sehingga kerahayuan kehidupan manusia dapat tercapai.

B. Pandangan Hindu tentang Nasionalisme dan Pancasila

Telah menjadi kesepakatan nasional kalau empat pilar dirumuskan melalui Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Dalam rangka menegakkan keempat pilar kebangsaan ini, setiap warga negara Indonesia,

khususnya umat Hindu apapun *svadharma* atau tugas kewajiban yang melekat padanya, dituntut berkomitmen menunjukkan sikap dan tindakan yang terpuji, seperti: 1) Menghormati kemerdekaan negara dan menjaga kedaulatannya dengan melakukan bela negara; 2) Taat terhadap hukum dengan mematuhi peraturan perundang-undangan negara; 3) Menghormati dan mencintai lingkungan wilayah Tanah Airnya; 4) Selalu berupaya menjalin persatuan dan memelihara kerukunan; dan 5) Bersikap bersahabat dengan tulus hati dan siap bekerja sama membangun peradaban bangsa, demi kemajuan, kemakmuran dan kedaulatan negaranya.

Setiap tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan mampu mengeksplorasi sumber-sumber ajaran dalam agama dan kepercayaannya masing-masing, yang dapat meyakinkan umatnya ke arah sikap dan tindakan tersebut di atas. Di dalam Agama Hindu, terdapat sumber ajaran yang menganjurkan untuk merealisasikan sikap dan tindakan tersebut. Misalnya, untuk menghormati kemerdekaan negara, dan menjaga kedaulatannya dengan melakukan bela negara yang diajarkan melalui **Rgweda I.80.1**: “Berikanlah selalu penghormatan kepada kemerdekaan negaramu”. Begitu juga dalam **Rgweda VIII.93.11**: “Kemerdekaan suatu bangsa tidak bisa ditindas, bahkan oleh para dewa maupun orang yang kuat penuh semangat”, **Yajurweda IX.23**: “Semoga kami waspada menjaga dan melindungi bangsa dan negara kami”, dan dalam **Atharwaweda .XII.1.2**: “Semoga kami dapat mengorbankan hidup kami untuk kemuliaan bangsa dan kedaulatan negara kami”.

Hindu juga memandang bahwa kecintaan terhadap negara dan tanah air (nasionalisme) dan pengejawantahan nilai-nilai intrinsik yang terkandung dalam Pancasila merupakan landasan bagi umat Hindu untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pandangan ini dapat dijumpai dalam banyak kitab suci. Kitab **Atharwaveda XII.1.45** menjelaskannya dengan pernyataan “Berikanlah penghargaan kepada bangsamu yang menggunakan berbagai bahasa daerah, yang menganut berbagai kepercayaan (agama) yang berbeda. Hargailah mereka yang tinggal bersama di bumi pertiwi ini. Bumi yang memberi keseimbangan bagaikan sapi yang memberi susunya kepada umat manusia. Demikian ibu pertiwi memberikan kebahagiaan yang melimpah kepada umat-Nya”. Hindu juga mendorong umatnya untuk selalu menjaga dan mewujudkan persatuan dan kesatuan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kedamaian, kemakmuran dan kebahagiaan, sebagaimana tertuang dalam **Atharwaveda III.8.5** yang menyatakan “Aku satukan pikiran, dan langkahmu untuk mewujudkan kerukunan di antara kamu. Aku bimbing mereka yang berbuat jahat menuju jalan yang benar”.

Secara berturut-turut, kitab suci yang lain juga menyatakan hal yang sama. **Atharwaveda III.30.4** menyatakan: “Wahai umat manusia! Bersatulah, dan rukunlah kamu seperti menyatunya para dewata. Aku telah anugerahkan hal yang sama kepadamu, oleh karena itu ciptakanlah persatuan di antara kamu”. Lalu **Rgveda X.191.2** menyatakan “Wahai umat manusia! Hiduplah dalam harmoni dan kerukunan. Hendaklah bersatu, dan bekerja sama. Berbicaralah dengan satu bahasa, dan ambilah keputusan dengan satu pikiran.

Seperti orang-orang suci di masa lalu yang telah melaksanakan kewajibannya, hendaklah kamu tidak goyah dalam melaksanakan kewajibanmu”.

Mewujudkan kehidupan yang demokratis dengan bermusyawarah dan menumbuhkan kehidupan yang dilandasi rasa saling pengertian, dapat juga ditemukan dalam **Rgveda X.191.3** yang menyatakan: “Wahai umat manusia! Pikirkanlah bersama. Bermusyawarahlah bersama. Satukanlah hati, dan pikiranmu dengan yang lain. Aku anugerahkan pikiran yang sama, dan fasilitas yang sama pula untuk kerukunan hidupmu”. **Rgveda X.191.4** menegaskan dengan: “Wahai umat manusia! Milikilah perhatian yang sama. Tumbuhkan saling pengertian di antara kamu. Dengan demikian engkau dapat mewujudkan kerukunan dan kesatuan”.

Begitu juga dengan keinginan untuk mengembangkan hati yang tulus ikhlas dalam membangun persahabatan sejati dengan sesama warga negara, bahkan dengan orang asing sekalipun juga dijelaskan dalam **Atharvaveda III.30.1** yang menyatakan: “Wahai umat manusia, Aku memberimu sifat ketulus ikhlasan, mentalitas yang sama, persahabatan tanpa kebencian, seperti halnya induk sapi mencintai anaknya yang baru lahir, begitu seharusnya kamu mencintai sesamamu”. **Atharvaveda VII.52.1** juga menyatakan: “Hendaknya harmonis dengan penuh keintiman di antara kamu, demikian pula dengan orang-orang yang dikenal maupun asing. Semogalah dewa Asvina menganugerahkan rahmat-Nya untuk keharmonisan antar sesama”. Terakhir, upaya untuk selalu hidup dengan dasar saling percaya, bersatu dengan permusyawaratan,

juga dijelaskan dalam **Rgveda, X.191.2-4** dengan pernyataan: “Hendaklah bersatu padulah, bermusyawarah dan mufakat guna mencapai tujuan dan maksud yang sama, seperti para Dewa pada zaman dahulu telah bersatu padu. Begitu juga, bersembahyanglah menurut caramu masing-masing, namun tujuan dan hatimu tetap sama, serta pikiranmu satu, agar dikau dapat hidup bersama dengan bahagia”.

❖ Buddha

Di Indonesia, Buddhisme berkembang luas sebagai agama yang dipeluk umatnya. Agama Buddha menjadi salah satu agama yang diakui pemerintah dalam bentuk mendapatkan pelayanan dari negara. Negara mengakomodasi Agama Buddha berdasarkan Keputusan Presiden No.1 Tahun 1965 yang dengan tegas mengakui Agama Buddha secara sah dan sejajar dengan agama-agama lain di negeri ini. Sekarang ini, baik awam perumah tangga maupun para anggota sangha (para bhikkhu) berasal dari beragam latar belakang status sosial ekonomi maupun etnis. Umat Buddha di Indonesia tidak lagi dimonopoli oleh etnis tertentu. Model-model bangunan tempat ibadah dan simbol yang dimiliki kelompok-kelompok umat Buddha pun juga sangat beragam.

Selama pergulatan mencari bentuk setelah tidur panjangnya, Agama Buddha mulai menyesuaikan dengan perkembangan situasi di Tanah Air. Orde Baru menjadikan agama sebagai kekuatan untuk mendukung pembangunan. Atas dasar itu, paham-paham yang dianggap tidak bertuhan diharuskan mendefinisikan secara jelas mengenai konsep ketuhanannya. Para tokoh Agama Buddha di Indonesia saat itu pun

disibukkan untuk merumuskan konsep ketuhanan dalam Agama Buddha, sesuai permintaan pemerintah.

Dalam Agama Buddha, dikenal luas dengan enam keyakinan bagi seorang penganut Buddha (Buddhis) atau yang disebut Sad-saddha, yang terdiri dari Tuhan Yang Maha Esa; Tri Ratna; Boddhisatva, arahat dan para Buddha; Hukum Kasunyataan; Kitab Suci Tri Pitaka; dan Nirvana.

Seorang umat Buddha meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa yang dikenal dengan sebutan Atthi Ajatam Abhutam Akatam Asamkatam, yang artinya Sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, Yang Mutlak. Tuhan Yang Maha Esa dalam Agama Buddha adalah Anatman (Tanpa Aku), sesuatu yang tidak berpribadi, sesuatu yang tidak dapat dipersonifikasikan dan sesuatu yang tidak dapat digambarkan dalam bentuk apapun. Hal ini diungkapkan oleh Sakyamuni Buddha dalam Kitab Suci Udana VIII ayat 3 (Priastana, 2005: 29)

Dalam pergumulan penafsiran yang lain, Adi-Buddha adalah salah satu sebutan untuk Tuhan Yang Maha Esa dalam agama Buddha. Adi-Buddha mungkin dianggap sebagai personifikasi dari Ketuhanan, tetapi pada dasarnya Tuhan Yang Maha Esa dalam agama Buddha tidak dinyatakan sebagai suatu pribadi.

“Para bhikkhu, ada Yang Tidak Dilahirkan, Tidak Dijelmakan, Tidak Diciptakan, Yang Mutlak. Para bhikkhu, bila tidak ada Yang Tidak Dilahirkan, Tidak dijelmakan, Tidak Diciptakan, Yang Mutlak, maka tidak ada kemungkinan untuk bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, dan pemunculan dari sebab yang lalu. Tetapi para bhikkhu, karena ada Yang Tidak Dilahirkan, Tidak Dijelmakan, Tidak Diciptakan, Yang Mutlak, maka ada

kemungkinan untuk bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, dan pemunculan dari sebab yang lalu” (Udana, VIII:3).

Di Indonesia sebutan lengkapnya adalah Sanghyang Adi Buddha, sedangkan bentuk pujiannya adalah Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Konsepsi Adi-Buddha sebenarnya sudah lama muncul di lingkungan agama Buddha, baik di tempat-tempat agama Buddha pernah berkembang, maupun di Indonesia. Selain itu, setidaknya Sanghyang Kamahayanikan, yang merupakan sumber primer dan naskah suci agama Buddha produk Indonesia zaman lampau, telah memberikan petunjuk kuat bagi hadirnya konsepsi Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Agama Buddha Indonesia, walaupun istilah-istilah yang dipakai untuk merujuk konsepsi ini berlain-lainan.

Penelitian Kandahjaya (1988) mengenai Borobudur memberikan penegasan adanya penggambaran konsepsi Adi Buddha di candi tersebut, walaupun bukan naskah tertulis yang langsung bisa dibaca artinya. Hasil penelitian ini semakin memperkuat dugaan dan memberi tambahan bukti bahwa Agama Buddha Indonesia sudah sejak awal perkembangannya percaya dan yakin kepada Adi Buddha sebagai Tuhan Yang Maha Esa.

Penggalian konsepsi tersebut juga terkait dengan anjuran Presiden Soekarno waktu itu yang mengajak setiap anak bangsa untuk berkepribadian Indonesia. Hal ini menggerakkan beberapa anggota sangha di bawah pimpinan Bhikkhu Ashin Jinarakkhita untuk melakukan penelusuran

tentang konsepsi berdasarkan kepribadian Indonesia. Konsep ketuhanan ini kemudian dapat diterima sebagai jawaban atas sila pertama Pancasila (Ekowati, 2012).

Untuk menghindari pandangan ketuhanan yang semata-mata personal, sedikit berbeda dengan pemahaman monoteistik, Buddhisme lebih mengandalkan moral individu. Pandangan moral dalam Agama Buddha selanjutnya secara implisit tergambar dalam sila-sila yang tertulis dalam Pancasila Buddhis. Unsur moral sehari-hari dilalui setelah keyakinan akan Tuhan Yang Maha Esa sebagai yang mendasari kehidupan dan alam semesta, dan juga sebagai tujuan atau cita-citanya yang tertinggi atau tujuan hidup akhirnya, yakni yang akan dipahami sepenuhnya bila telah tercapainya Nirvana. Dengan begitu, penghayatan seorang Buddhis terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini adalah sekaligus awal dan akhir dan yang selalu dekat karena selalu menyertai langkahnya untuk ditemukan di dalam segenap fenomena kehidupan ini, dan sekaligus sesuatu yang harus dicapai dengan menjalankan moralitas (sila), pengembangan batin (samadhi) dan tumbuhnya prajna (pandangan terang, non-dualisme) (Endro, 2012).

Dalam penguatan moral, Buddhisme mengenal Pancasila Buddhis. Secara umum terdapat dua pengertian sila, yaitu pertama, Kehendak atau sikap batin yang terdapat sebagai ucapan benar dan perbuatan benar. Kedua, cara untuk mengendalikan diri dari segala bentuk-bentuk pikiran yang tidak baik atau merupakan usaha untuk membebaskan diri dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin.

Secara praktis, Pancasila adalah lima latihan moral. Pancasila Buddhis merupakan peraturan yang hendaknya dilatih dan dilaksanakan oleh umat Buddha. Umat Buddha setiap kebaktian pasti membaca paritta Pancasila. Jika kebaktian dihadiri anggota Sangha, umat meminta tuntunan Tisarana dan Pancasila Buddhis kepada anggota Sangha. Umat Buddha yang meminta untuk divisudhi upasaka atau upasika pasti meminta tuntunan Pancasila Buddhis secara khusus kepada Bhikkhu Sangha. Umat Buddha yang ingin divisudhi upasaka atau upasika ini berikrar untuk melaksanakan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa Pancasila Buddhis merupakan pegangan atau pedoman hidup bagi umat Buddha terutama bagi upasaka dan upasika.

Berikut Pancasila Buddhis secara berurutan (Karsan dan Tanumihardja, 2004; Priastana, 2005):

Panatapata veramani sikkhapadang samadiyami (Aku bertekad melatih menahan diri dari membunuh makhluk hidup). Terdapat lima factor yang disebut membunuh, yaitu ada makhluk hidup, mengetahui bahwa makhluk itu masih hidup, berpikir untuk membunuhnya, berusaha untuk membunuhnya dan makhluk itu mati sebagai akibat dari usaha tersebut. Adapun objek dari pelanggaran Sila Pertama adalah manusia, binatang, yaitu binatang berguna dan tidak berguna.

Adinadana veramani sikkhapadang samadiyami (Aku bertekad melatih menahan diri dari mengambil barang yang tak diberikan). Dalam hal ini, terdapat lima faktor untuk dapat disebut mencuri, yaitu adanya sesuatu/barang/benda milik pihak lain, mengetahui bahwa barang itu ada pemiliknya, berpikir untuk mencurinya, berusaha untuk

mencurinya, dan kelima berhasil mengambil barang itu melalui usaha tersebut. Termasuk di dalamnya untuk dihindari yaitu penghancuran barang orang lain dengan sengaja untuk balas dendam dan mempergunakan barang dengan sewenang-wenang.

Kamesumicchacara veramani sikkhapadang samadiyami (Aku bertekad melatih menahan diri dari perbuatan asusila). Ada empat hal untuk dapat disebut berzinah, yaitu adanya objek yang tidak patut digauli, mempunyai pikiran untuk menyetubuhi objek tersebut, berusaha menyetubuhi, berhasil menyetubuhi, dalam arti berhasil memasukkan alat kemaluannya ke dalam salah satu dari tiga lubang (mulut, anus, atau liang peranakan) walaupun hanya sedalam biji wijen.

Musavada veramani sikkhapadang samadiyami (Aku bertekad melatih menahan diri dari bicara yang tidak benar). Sila ini dimengerti dengan mewaspadaai adanya empat faktor untuk dapat disebut berdusta, antara lain timbulnya sesuatu hal yang tidak benar, mempunyai pikiran untuk berdusta, berusaha berdusta dan pihak lain mempercayainya.

Surameraya majjapamadattana veramani sikkhapadang samadiyami (Aku bertekad melatih menahan diri tidak makan makanan/minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan).sila ini menekankan empat faktor untuk dapat disebut mabuk-mabukan, yaitu munculnya sesuatu yang merupakan Sura, Meraya, atau Majja; yaitu sesuatu yang membuat nekat, mabuk, tak sadarkan diri, yang menjadi dasar dari kelengahan dan kecerobohan. Selanjutnya mempunyai keinginan untuk menggunakannya, lalu benar-benar menggunakannya dan timbulnya gejala mabuk atau sudah menggunakannya (meminumnya) hingga masuk melalui tenggorokan. Karena itu untuk menahan diri

sesuai sila kelima ini patut dihindari segala jenis minuman/makanan yang memabukkan dan barang yang bila digunakan/dimasukkan didalam tubuh dapat membuat kita tidak sadar dan ketagihan.

Menyoal Buddhisme dan nasionalisme, Swearer (2006: 72) menyebutkan bahwa teks-teks Pali dalam Buddhisme menyatakan bahwa Buddha sangat dekat dengan kalangan raja semasa hidupnya di India bagian utara. Hal tersebut dilihat sebagai sesuatu yang menguntungkan untuk pengembangan viara Buddhis (Buddhist monastic). Karena itu beralasanlah untuk mengatakan sejak awal sangha Buddhis ternyata disokong oleh elite sosial, ekonomi dan politik untuk alasan sosial, politik dan juga keagamaan tertentu tentunya. Perlu dicatat pula, bahwa Pangeran Siddharta berasal dari kelas penguasa, khattiya. Legenda menyebutkan ayah dari Siddharta, para raja dari clan Sakya dan para raja lainnya semasa hidupnya merupakan para pendukung ajaran Siddharta.

Secara umum menurut Swearer, institusi keagamaan dan institusi kerajaan saling mendukung satu sama lain dalam masyarakat Buddhis klasik. Perlindungan kerajaan terhadap pranata Buddhis berbalas dengan pelembagaan kepatuhan (loyalty) yang diberikan pada kerajaan. Di samping itu, konstruksi kosmologi keagamaan dan mitologi yang menguatkan raja sebagai penyemai Agama Buddha dianggap sangat penting bagi terciptanya keharmonisan dan kedamaian bagi seluruh negeri.

Asoka Maurya dalam tradisi Buddhis dianggap sebagai chakkavatin atau raja dunia Buddhis dari dinasti Maurya (317-189 SM). Selain menerapkan nilai-nilai keluhuran dan keadilan, mendukung perkembangan Buddhisme (monastic order), juga dianggap mempersonifikasi sepuluh ajaran raja

atau dasarajadhamma, yaitu antara lain pemurah, berbudi luhur, pengorbanan diri, kebajikan, pengendalian diri, penyabar, non violence, penyayang, dan pengikut norma-norma kebajikan. Asoka dianggap penyatu India dan memimpin wilayah yang begitu luas antara tahun 270-232 SM

A. Kong Hu Cu

Awalnya istilah Indonesia merupakan definisi ilmiah bagi kepulauan Hindia yang dikenalkan oleh para antropolog Barat, seperti JR Logan, GSW Earl, dan Adolf Bastian, di penghujung abad ke-19. Endapan diskursus tersebut telah bertransformasi menjadi suatu bangsa, tepatnya setelah jiwa-jiwa mudanya mengucap diktum Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa. Berlaksa bangsa yang sebelumnya terberai ideologi primordialisme (kedaerahan, kesukuan, keagamaan) bisa bersatu.

Masyarakat madani kita yang mulanya didominasi kental oleh gairah primordial, seperti Jong Java, Jong Sumatranen, Jong Celebes, Jong Ambon, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Jong Tionghoa (sejarah mencoba menutupinya) tampak mengorientasi kiblat. Kelompok lainnya yang berlatar belakang berbeda-beda, kalangan agamis (Islam), melakukan konsolidasi di bawah payung ideologis bernama keindonesiaan. Walhasil, 17 tahun kemudian, proklamasi kemerdekaan dideklarasikan, dan lahirlah Pancasila dan UUD 1945. Terpenuhi sudah syarat ontologis yang dibutuhkan Indonesia untuk menjadi sebuah Negara bangsa (nation-state) dalam lembaran sejarah peradaban dunia.

Sejak dahulu dalam UUD 1945 (walaupun sudah empat kali diamandemen) dikenal terminologi Indonesia asli dan dalam Pasal 2 UU Kewarganegaraan RI 2006 terdapat istilah “asli” yang berbunyi: “Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.” Sejatinya kata asli memiliki dua dimensi arti yaitu asal usul (originality) atau sejati (genuine), yang artinya sejati atau tulus. Artian asal usul sebenarnya tidaklah mempunyai dasar ilmiah yang kukuh seperti yang telah lama diuraikan bahwa sebenarnya bangsa-bangsa di kepulauan Nusantara ini pada dasarnya adalah bangsa campuran.

Dalam kehidupan politik yang modern pengertian bangsa (nation) tidak dikaitkan dengan faktor etnisitas, melainkan dengan rasa solidaritas dengan sesama warga negara untuk bersama-sama mewujudkan kehidupan bernegara. Keaslian tidaklah terkait pada faktor fisik melainkan pada semangat patriotisme dan nasionalisme. Jadi Indonesia yang asli haruslah bermakna Indonesia yang sejati, yang memiliki semangat cinta Tanah Air dan seluruh bangsa, serta memandang semua komponen bangsa sebagai sesama. Sebagai contoh jika keaslian dikaitkan dengan faktor biologis, maka etnis Jawa yang tinggal di Suriname atau orang Ambon eks KNIL, ketika mereka kembali ke Indonesia dan menjadi WNI maka mereka berhak menjadi presiden.

Jadi seolah-olah lebih berhak dibandingkan dengan etnis Tionghoa, Arab, India, atau Indo yang telah turun temurun hidup di sini dan telah berjasa banyak bagi kesejahteraan bangsa. Oknum Tionghoa yang mengacaukan ekonomi dan

menyebabkan kehancuran bank, tidak membayar pajak dengan adil, menyelundupkan kekayaan negara, tidaklah dapat dikategorikan Indonesia yang sejati. Bahkan tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok Indonesia sama sekali. Walaupun memakai nama Indonesia dan berbahasa Indonesia dengan fasih serta mengenal sejarah perjuangan dengan baik. Tidak dapat disangkal bahwa banyak oknum Tionghoa yang melakukan tindakan kriminal dalam bidang ekonomi dan perdagangan dan tentunya tindakan kriminal lainnya yang cukup menyakitkan bangsa Indonesia secara keseluruhan, baik etnik Tionghoa maupun Melayu.

Namun disisi lain kontribusi etnis Tionghoa khususnya dalam perekonomian Indonesia sangatlah signifikan, hal ini dapat dikaji dari sejak awal kedatangan etnis Tionghoa di Nusantara. Intorduksi teknologi pengolahan pangan dan hasil pertanian seperti pembuatan gula tebu, tanaman jati, pendulangan emas dan timah, teknik pengolahan kedelai menjadi tahu, kecap, tauco misalnya merupakan teknik-teknik yang dibawa oleh orang-orang Tionghoa ke Nusantara.

Atas sumbangsiah tersebut mungkin anak cucu mereka kini berhak menikmati buah karya leluhurnya tersebut. Dalam kehidupan modern, etnik Tionghoa menyumbangkan tenaganya dalam bidang perdagangan dan telah menyediakan jutaan lapangan pekerjaan bagi semua pihak. Tidak sedikit yang banyak berkarya dalam bidang olahraga, ilmu pengetahuan, kedokteran, hukum, perhubungan, keteknikan, pendidikan, dan hampir semua bidang profesi lainnya. Bahkan ada umat Khonghucu (Yap Tjwan Bing) yang menjadi anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-

usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Etnis Tionghoa hendaknya memang tidak usah ragu-ragu dalam membina negara dan bangsa Indonesia karena memang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari negeri ini. Kontribusi etnis Tionghoa dalam membangun negara dan bangsa Indonesia tidaklah sedikit. Mulai sekarang etnis Tionghoa Indonesia haruslah merasa benar-benar at home di negara ini. Setiap individu Tionghoa Indonesia harus aktif menangkis tuduhan-tuduhan yang tidak adil sesuai tugas dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang baik.

Keadaan demografi dan landscape politik sekarang ini sangatlah berbeda. Konsep kebangsaan lama yang terlalu menekankan homogenitas di atas keberagaman tidaklah mengikuti irama zaman. Kebudayaan yang kita hadapi bukan cuma nasional tetapi juga multinasional. Konfigurasi kebudayaan Indonesia akan semakin mendekati konfigurasi kebudayaan dunia. Indonesia akan menghadapi kenyataan semakin berkembangnya kebudayaan Amerika, Eropa, Arab, China, Jepang, Korea, India, dan sebagainya.

Keanekaan tidak hanya antar suku bangsa yang telah ada, tetapi dengan kebudayaan bangsa lain. Jadi konsep kebangsaan zaman kini mungkin haruslah menjadi suatu konsep yang terbuka dan semakin menuju pada semangat internasionalisme yang merujuk pada perdamaian dunia. Selaras dengan apa yang dikatakan Kongzi (Confucius) bahwa Semua Manusia adalah Bersaudara (All Men are Brothers and Sisters).

Nasionalisme dalam Pandangan Khonghucu

Dalam Kitab Lunyu dikisahkan bahwa leluhur Kongzi (Confucius) adalah para kaisar dinasti Shang (1766 SM s.d. 1122 SM). Setelah dinasti Shang runtuh dan digantikan oleh dinasti Zhou (1122 SM s.d. 256 SM), para keturunan kaisar dinasti Shang ini diangkat menjadi rajamuda negeri Song (sekarang di propinsi Henan). Karena negeri Song mempunyai tradisi unik yakni menyerahkan tahta kepada saudara muda dan bukannya kepada putranya, maka leluhur Kongzi (Confucius) yang bernama Fufu He yang tak lain adalah putra raja muda Song Xi Gong tidak menjabat sebagai raja muda negeri Song lagi. Keturunan Fufu He yang bernama Kong Fujia dan menjabat sebagai Menteri Perang negeri Song adalah orang pertama yang menggunakan marga Kong. Keturunan Kong Fujia generasi ke 4 yakni Kong Fangshu kemudian pindah ke negeri Lu (sekarang di propinsi Shandong). Kong Fangshu sendiri terhitung kakek buyut dari Kongzi (Confucius).

Bandingkan keadaan Kongzi (Confucius) ini dengan para Huaqiao (Chinese Overseas) di Indonesia yang seringkali mendapat cap tidak nasionalis terhadap tanah air baru mereka. Leluhur Kongzi (Confucius) adalah orang negeri Song yang kemudian pindah ke negeri Lu, jadi Confucius terhitung orang negeri Song perantauan dan ia terang-terangan mengakui asal usulnya sebagai keturunan kaisar dinasti Shang. Tapi saat negeri Lu terancam diserang oleh negeri lain, Confucius segera mengutus murid-muridnya untuk menyelamatkan negeri Lu. Ranyou pernah memimpin pasukan Lu mengalahkan pasukan musuh sedang pada

kesempatan lain Zigong diutus untuk menyelamatkan negeri Lu melalui jalur diplomasi. Jadi jelas bahwa Confucius menganggap negeri Lu ini sebagai tanah airnya dan membelanya mati-matian. (Sebagai catatan, negeri Lu diperintah oleh keturunan kaisar dinasti Zhou yang dulunya meruntuhkan dinasti Shang yang merupakan leluhur dari Confucius sendiri).

Contoh lainnya tentang nasionalisme dalam pandangan agama Khonghucu yang jelas-jelas melampaui batas negara. Kejadian ini terjadi di Jepang dan kini kisah ini telah menjadi legenda nasionalisme ala agama Khonghucu. Yamazaki Ansei (1619 s.d. 1682) adalah penganut agama Khonghucu di Jepang. Pada suatu hari muridnya bertanya kepadanya, Guru, jika seandainya Kongzi (Confucius) dan Mencius memimpin pasukan dari Tiongkok dan menyerang negeri kita. Apa yang engkau lakukan sebagai penganut mereka?

Yamazaki menjawab dengan tenang, Saya akan mengenakan baju perang dan mengangkat senjata menghadapi mereka. Saya bahkan akan berusaha menangkap mereka berdua hidup-hidup! Seandainya ini benar terjadi, saya yakin Confucius dan Mencius pasti akan menghargai tindakan saya untuk menunaikan tugas saya untuk kaisar Jepang dan negeri ini

2. Lembar kerja

Lembar kerja adalah lembaran yang berisi tentang panduan satu atau beberapa jenis kegiatan yang harus dilakukan sebagai bagian dari proses kegiatan pelatihan setiap topik. Lembar kerja dibagikan kepada peserta menjelang aktivitas dilakukan. Dihindari menyusun lembar kerja yang hanya

berisi daftar pertanyaan atau daftar perintah. Bagaimana menyusun Lembar Kerja yang efektif dapat dilihat pada materi penyajian (ppt) berjudul LEMBAR KERJA yang ada di Basecamp SDO. Dalam setiap topik tidak selalu memerlukan Lembar Kerja dan sebaliknya bisa memerlukan lebih dari satu Lembar Kerja

3. Catatan Fasilitator

Fasilitator membuat catatan menyangkut nasionalisme dan pancasila dalam persepektif agama-agama dalam kertas tersendiri. Kemudian nanti dapat diusulkan untuk dijadikan bahan untuk dikembangkan dan diperdalam lagi ke dalam diskusi kelompok masing masing agama.

Bagian 6

EVALUASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Evaluasi Program dan Tindak Lanjut merupakan salah satu komponen manajemen program yang esensial dalam pelaksanaan program mengingat urgensinya dalam memperbaiki kualitas dan bobot pelaksanaan program. Kegiatan evaluasi ini juga penting untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program dengan mengacu pada kriteria atau patokan-patokan tertentu sesuai dengan program yang dilaksanakan. Kriteria atau patokan yang dipakai untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program mengacu pada ketercapaian kompetensi, keterpenuhan kebutuhan-kebutuhan peserta didik dan pihak-pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung berperan membantu peserta didik memperoleh perubahan perilaku dan pribadi ke arah yang lebih baik.

Dalam keseluruhan kegiatan, penilaian diperlukan untuk memperoleh umpan balik terhadap keefektifan pelayanan yang telah dilaksanakan. Dengan informasi ini dapat diketahui sampai sejauh mana derajat keberhasilan kegiatan sekaligus dapat ditetapkan langkah-langkah tindak lanjut untuk memperbaiki dan mengembangkan program selanjutnya.

Selanjutnya terdapat dua macam aspek kegiatan penilaian program yaitu penilain proses dan penilaian hasil. Penilaian proses dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana keefektifan kegiatan dilihat dari prosesnya, sedangkan penilaian hasil dimaksudkan untuk memperoleh informasi keefektifan kegiatan dilihat dari hasilnya. Aspek yang dinilai baik proses maupun hasil antara lain:

1. Kesesuaian antara program dengan pelaksanaan;
2. Keterlaksanaan program;
3. Hambatan-hambatan yang dijumpai;
4. Respon peserta
5. Perubahan kemajuan peserta

~oOo~